



Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas semua limpahan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada publik, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 juga merupakan salah satu implementasi dari manajemen kinerja SAKIP dalam upaya mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai visi “Pada Tahun 2018 Sumedang Senyum Manis” dan misi Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018.

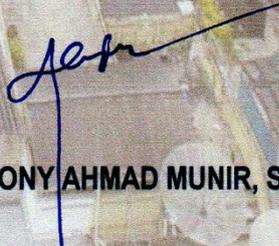
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang tentunya disusun dengan tujuan memberikan informasi tentang penyelenggaraan manajemen kinerja pemerintah yang telah dilakukan sebagai komitmen kami untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel guna mewujudkan pemerintah yang berorientasi pada hasil.

Walaupun penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumedang secara menyeluruh telah banyak menuai hasil, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna sesuai prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, semoga LKIP ini akan memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan aparatur yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak atas bantuan materil maupun moril sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan tepat waktu.

Sumedang, Maret 2019

BUPATI SUMEDANG

  
H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Sumedang “**Pada Tahun 2018 Sumedang Sumedang Senyum Manis**” yang tertuang dalam RPJMD, maka secara umum strategi yang harus dilakukan untuk mendorong percepatan perwujudan visi dan misi tersebut adalah melalui upaya peningkatan hak-hak dasar masyarakat, peningkatan tingkat perekonomian daerah dan peningkatan akuntabilitas pemerintahan.

RPJMD tahun 2014 – 2018 Kabupaten Sumedang saat ini merupakan tahap ketiga dari RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005 – 2025. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005- 2025, RPJMD tahap ketiga bertujuan lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) secara tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 bertujuan memberikan gambaran secara konkrit tentang pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sumedang tahun 2014 – 2018 yang termuat dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang serta Perjanjian Kinerja Bupati Sumedang Tahun 2018, telah ditetapkan 10 sasaran strategis dan 14 indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran 10 sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang efektif dan efisien terdiri atas 3 indikator kinerja memperoleh persentase rata-rata kumulatif 107,24 % atau Sangat Baik
2. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik terdiri dari 1 Indikator kinerja telah memperoleh persentase rata-rata kumulatif sebesar 104,50 % atau Sangat Baik.

3. Sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan memperoleh persentase 93,99 % atau Baik.
4. Sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat memperoleh persentase sebesar 105,06 % atau Sangat Baik.
5. Sasaran strategis meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat memperoleh persentase 100 % atau Baik
6. Sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah di wilayah perdesaan dan perkotaan terdiri atas 2 indikator kinerja memperoleh rata-rata persentase kumulatif 88 % atau Baik
7. Sasaran strategis terwujudnya Infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru memperoleh persentase 100,00 % atau Baik.
8. Sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang terdiri atas 1 indikator kinerja memperoleh persentase rata-rata kumulatif 120,36 % atau Sangat Baik.
9. Sasaran strategis meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat terdiri atas 1 indikator kinerja memperoleh persentase kumulatif 168,00 % atau Sangat Baik
10. Sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan terdiri atas 2 Indikator Kinerja memperoleh persentase kumulatif 82,95 % atau Baik

Dengan demikian 10 sasaran strategis dan 14 indikator kinerja yang menjadi bidikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat dilaksanakan dengan Sangat Baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun ketidaksempurnaan atas capaian indikator kinerja akan menjadi bahan kajian secara komprehensif guna perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang di masa yang akan datang

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	I
<b>IKHTISAR ESEKUTIF</b> .....	Iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	Vi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Gambaran Umum Organisasi .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	15
1.3 Maksud dan Tujuan .....	16
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis .....	17
1.5 Sistematika Penyusunan LKIP .....	19
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	
2.1 Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang.....	20
2.2 Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sumedang.....	27
2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan Program Prioritas Tahun 2018.....	29
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	51
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018</b> .....	62
3.1 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018	62
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018.....	64
B. Deskripsi Analisis Atas Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018.....	66
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	91
A. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan .....	91
B. Belanja Daerah .....	92
C. Pembiayaan Daerah .....	92
D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	94
E. Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kinerja .....	97
3.3 Penghargaan Tahun 2018.....	107
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	108
4.1 Kesimpulan.....	108

Lampiran – lampiran : .....

## DAFTAR TABEL

1.1	Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan di kabupaten Sumedang .....	2
1.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2010 dan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017.....	6
1.3	Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2018 .....	10
1.4	Data PNS Kabupaten Sumedang Berdasarkan Gender.....	12
1.5	Data PNS Kabupaten Sumedang Berdasarkan Pendidikan.....	13
1.6	Data PNS Kabupaten Sumedang Berdasarkan Golongan.....	14
2.1	Hubungan Visi, Misi, tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	26
2.2	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sumedang.....	27
2.3	Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2018 dan Program Prioritas tahun 2018 RPJMD.....	29
2.4	Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018.....	51
3.1	Skala Penilaian.....	63
3.2	Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018.....	64
3.3	Capaian Kinerja sasaran 1.....	67
3.4	Capaian Kinerja sasaran 2.....	70
3.5	Capaian Kinerja sasaran 3.....	72
3.6	Capaian Kinerja sasaran 4.....	74
3.7	Capaian Kinerja sasaran 5.....	77
3.8	Capaian Kinerja sasaran 6.....	79
3.9	Capaian Kinerja sasaran 7.....	82
3.10	Capaian Kinerja sasaran 8.....	84
3.11	Capaian Kinerja sasaran 9.....	86
3.12	Capaian Kinerja sasaran 10.....	88
3.13	Realisasi APBD Tahun 2018.....	91
3.14	Rencana dan Realisasi APBD Tahun 2018.....	92
3.15	Pembiayaan Daerah.....	92
3.16	Perbandingan realisasi APBD Tahun 2017 dan 2018.....	93
3.17	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Pencapaian Sasaran.....	94
3.18	Alokasi dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian sasaran Kinerja.....	97
3.19	Penghargaan Tahun 2018.....	107

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Peta Administrasi Kabupaten Sumedang .....	3
1.2	Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang.....	5
1.3	Grafik Piramida Penduduk Kabupaten sumedang Tahun 2017.....	7
1.4	Gambar Bagan Struktur Organisasi.....	11
1.5	Gambar Data PNS berdasarkan Gender.....	13
1.6	Gambar Data PNS berdasarkan pendidikan.....	14
1.7	Gambar Data PNS berdasarkan Golongan.....	15





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

#### 1.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950). Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat 06<sup>o</sup>44' - 7<sup>o</sup>83' lintang selatan



dan antara 107°21'-108°21' bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 adalah 155.872 Ha yang terdiri dari 26 kecamatan terbagi ke dalam 270 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Jatigede (7,31%) dari total luasan Kabupaten Sumedang, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Cisarua (0,93%).

## A. Letak Geografis

Batas administratif Kabupaten Sumedang terletak pada posisi 06°34' 46,18" - 7° 00' 56,25" lintang selatan dan 107° 01' 45,63" - 108° 12' 59,04" bujur timur. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Indramayu;
- b) Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung;
- c) Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang;
- d) Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun luas wilayah per Kecamatan, sebagaimana Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1. 1  
Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan  
di Kabupaten Sumedang

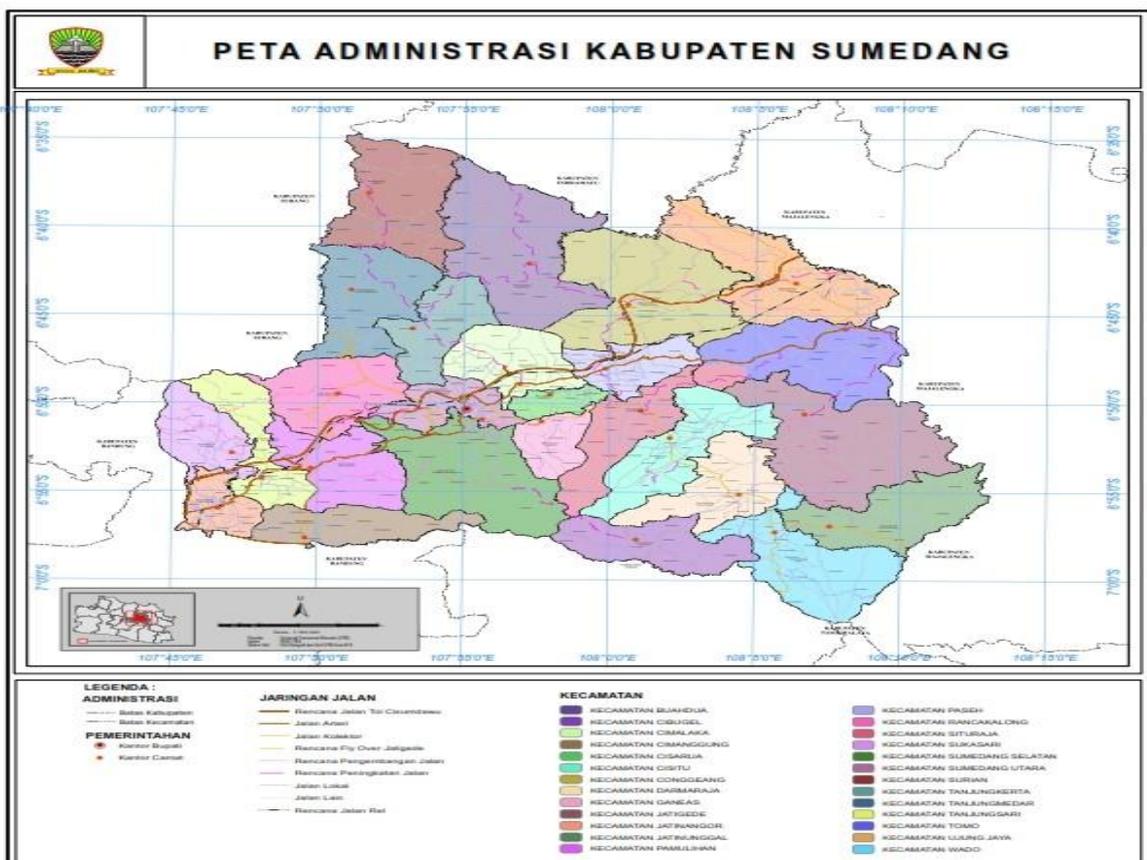
No	Kecamatan	Luas (Ha)	Desa	Kelurahan	Presentase (%)
1	Wado	7.334	10		4,71%
2	Jatinunggal	6.311	9		4,05%
3	Darmaraja	5.403	12		3,47%
4	Cibugel	4.999	7		3,21%
5	Cisitu	6.398	10		4,10%
6	Situraja	5.666	15		3,64%
7	Conggeang	11.220	12		7,20%
8	Paseh	3.382	10		2,17%
9	Surian	7.645	9		4,90%
10	Buahdua	11.149	14		7,15%
11	Tanjungsari	4.319	12		2,77%
12	Sukasari	3.899	7		2,50%
13	Pamulihan	5.367	11		3,44%
14	Cimanggung	4.298	11		2,76%
15	Jatinangor	2.562	12		1,64%
16	Rancakalong	5.596	10		3,59%

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Desa	Kelurahan	Presentase (%)
17	Sumedang Selatan	9.659	10	4	6,20%
18	Sumedang Utara	3.132	10	3	2,01%
19	Ganeas	2.525	8		1,62%
20	Tanjungkerta	4.393	12		2,82%
21	Tanjungmedar	6.688	9		4,29%
22	Cimalaka	4.755	14		3,05%
23	Cisarua	1.450	7		0,93%
24	Tomo	7.592	9		4,87%
25	Ujungjaya	8.738	9		5,61%
26	Jatigede	11.392	11		7,31%
<b>Jumlah</b>		<b>155.872</b>	<b>270</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

Gambar 1. 1

Peta administrasi Kabupaten Sumedang berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2038 diperlihatkan pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

## B. Topografi

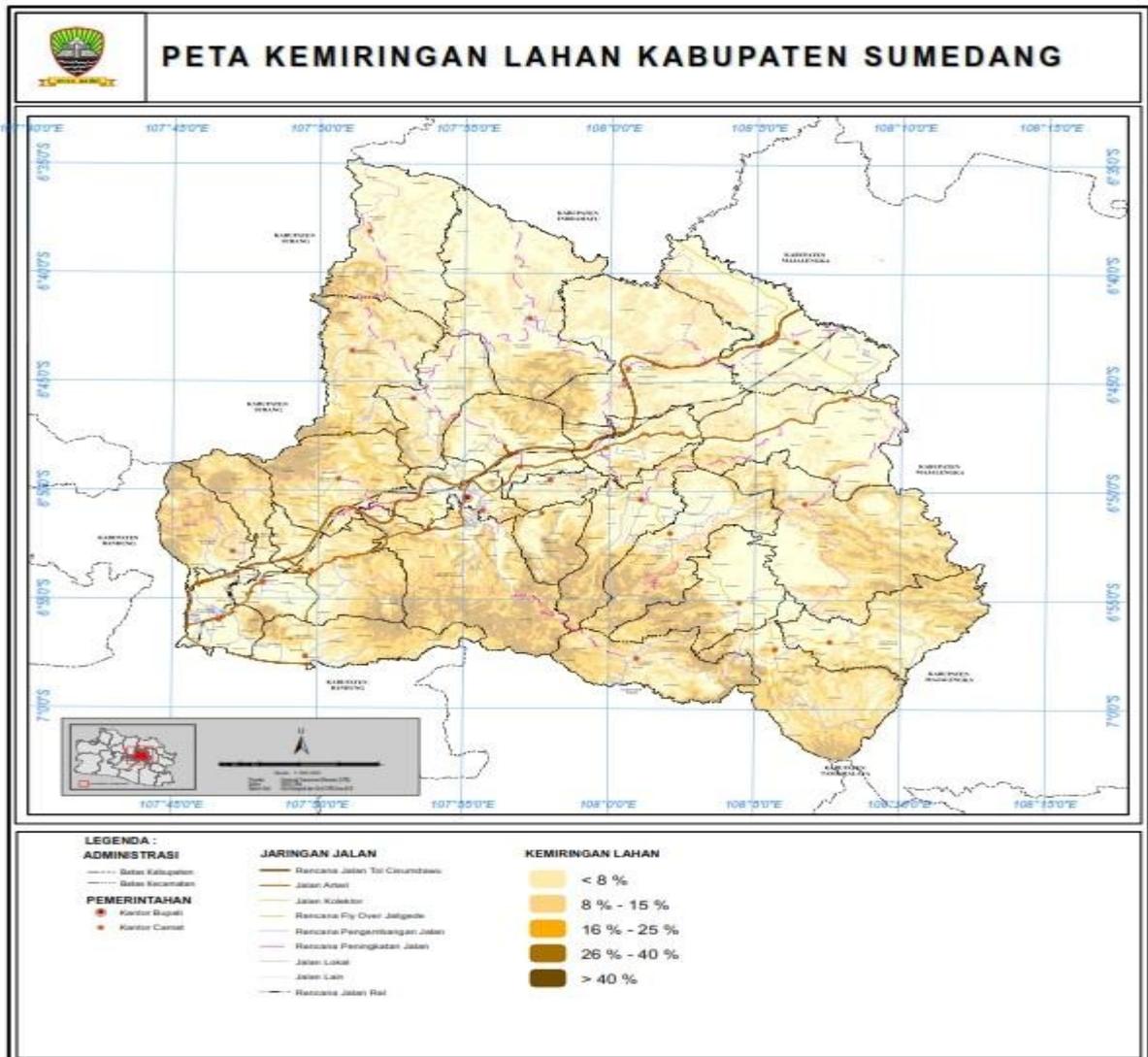
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut.

Secara umum topografi dan kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kelas, yakni:

- 0 – 8%, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkabupatenan;
- 8 – 15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya;
- 15 – 25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di wilayah Kabupaten Sumedang di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat;
- 25 – 40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;
- Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini pada bagian selatan, bagian timur dan bagian barat daya.

Peta kemiringan lahan Kabupaten Sumedang berdasarkan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2038 diperlihatkan pada Gambar 1.2 dibawah ini.

Gambar 1. 2  
Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang



Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

### C. Demografi

Penduduk Kabupaten Sumedang berdasarkan proyeksi penduduk data tahun 2017 sebanyak 1.146.435 jiwa yang terdiri atas 570.808 jiwa penduduk laki-laki dan 575.627 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kabupaten Sumedang mengalami pertumbuhan sebesar 0,38%. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan tahun 2017 sebesar 99,29. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Kondisi tersebut dapat berimplikasi pada peningkatan angka fertilitas/kelahiran akan meningkat.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sumedang tahun 2017 mencapai 753 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 26 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jatinangor dengan kepadatan sebesar 4.348 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Jatigede sebesar 215 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Tabel 1. 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sumedang  
Tahun 2010 dan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017

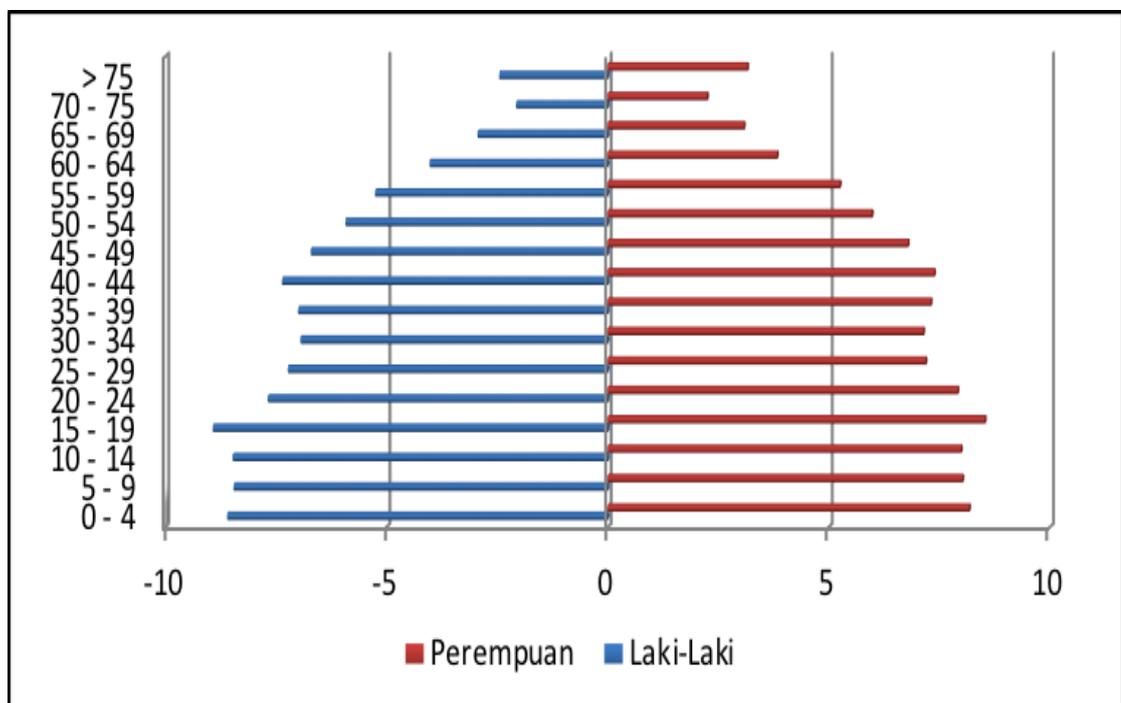
Kecamatan	Jumlah Penduduk			
	2010	2015	2016	2017
Jatinangor	108.602	112.621	113.234	113.913
Cimanggung	81.031	82.965	83.204	83.490
Tanjungsari	76.919	79.903	80.367	80.878
Sukasari	31.339	33.237	33.506	33.735
Pamulihan	54.726	58.510	59.033	59.471
Rancakalong	37.751	38.844	38.983	39.094
Sumedang Selatan	74.397	76.897	77.225	77.493
Sumedang Utara	88.854	95.409	96.281	96.994
Ganeas	23.561	24.319	24.416	24.494
Situraja	37.444	38.472	38.598	38.697
Cisitu	26.360	26.899	26.986	27.024
Darmaraja	37.267	37.626	37.675	37.717
Cibugel	20.926	21.326	21.375	21.413
Wado	43.249	44.191	44.306	44.396
Jatinunggal	41.481	42.613	42.755	42.869
Jatigede	23.853	24.013	24.033	24.050

Kecamatan	Jumlah Penduduk			
	2010	2015	2016	2017
Tomo	22.434	22.956	23.022	23.075
Ujungjaya	29.222	29.582	29.630	29.670
Conggeang	29.036	29.085	29.093	29.100
Paseh	36.085	36.680	36.757	36.819
Cimalaka	56.863	58.891	59.140	59.335
Cisarua	19.151	19.327	19.351	19.372
Tanjungkerta	33.666	34.588	34.701	34.790
Tanjungmedar	24.315	24.852	24.919	24.972
Buahdua	32.128	32.503	32.553	32.595
Surian	10.918	10.964	10.972	10.979
<b>TOTAL</b>	<b>1.101.578</b>	<b>1.137.273</b>	<b>1.142.097</b>	<b>1.146.435</b>

Sumber: Kab. Sumedang Dalam Angka Tahun 2018. BPS.

Selanjutnya penduduk di Kabupaten Sumedang dapat dianalisis berdasarkan struktur umurnya, sebagaimana piramida penduduk pada Gambar 1.3, dapat diketahui komposisi penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2017.

Gambar 1.3  
Gambar Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Sumendang Tahun 2017



Sumber: Kab. Sumedang Dalam Angka Tahun 2018. BPS

Terlihat dari bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga, penduduk Kabupaten Sumedang dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0 – 19 tahun) sebesar 30,87%, jumlah penduduk yang berusia produktif (15 – 64 tahun) sebesar 65,13%, dan jumlah penduduk usia lanjut ( $\geq 65$  tahun) tergolong kecil yaitu 5,1%. Komponen penduduk terbesar pada usia produktif, merupakan bonus demografi bagi Kabupaten Sumedang apabila bisa memanfaatkan struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna.

Komposisi penduduk berstruktur usia muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok usia muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga digunakan untuk melihat angka beban tanggungan (ABT). Pada tahun 2017 ABT di Kabupaten Sumedang sebesar 39%. Angka ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat 39 orang usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Sumedang. ABT tersebut akan memacu penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya, yang pada gilirannya akan menjadi modal yang cukup baik mendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang.

### **1.1.2 Susunan Organisasi Tata Kerja**

Susunan perangkat daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, yaitu sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan
  2. Dinas Kesehatan
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
  5. Satuan Polisi Pamong Praja
  6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  12. Dinas Perhubungan
  13. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
  14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
  15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  16. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
  17. Dinas Arsip dan Perpustakaan
  18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
  19. Dinas Perikanan dan Peternakan
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- f. Kecamatan sebanyak 26
- g. Kelurahan sebanyak 7

Adapun tugas dan fungsi setiap perangkat daerah diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah.

Perkembangan jumlah OPD Kabupaten Sumedang sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.3  
JUMLAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2015-2018

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Tahun		
		2015	2017	2018
1.	Badan Daerah	7	7	4
2.	Dinas Daerah	15	15	19
3.	Kantor Daerah	3	3	
4.	Kecamatan	26	26	26
5.	Kelurahan	7	7	7
6.	Sekretariat	2	2	2
7.	Inspektorat	1	1	1
8.	Rumah Sakit Daerah	1	1	1
9.	Lembaga Lain	1	1	

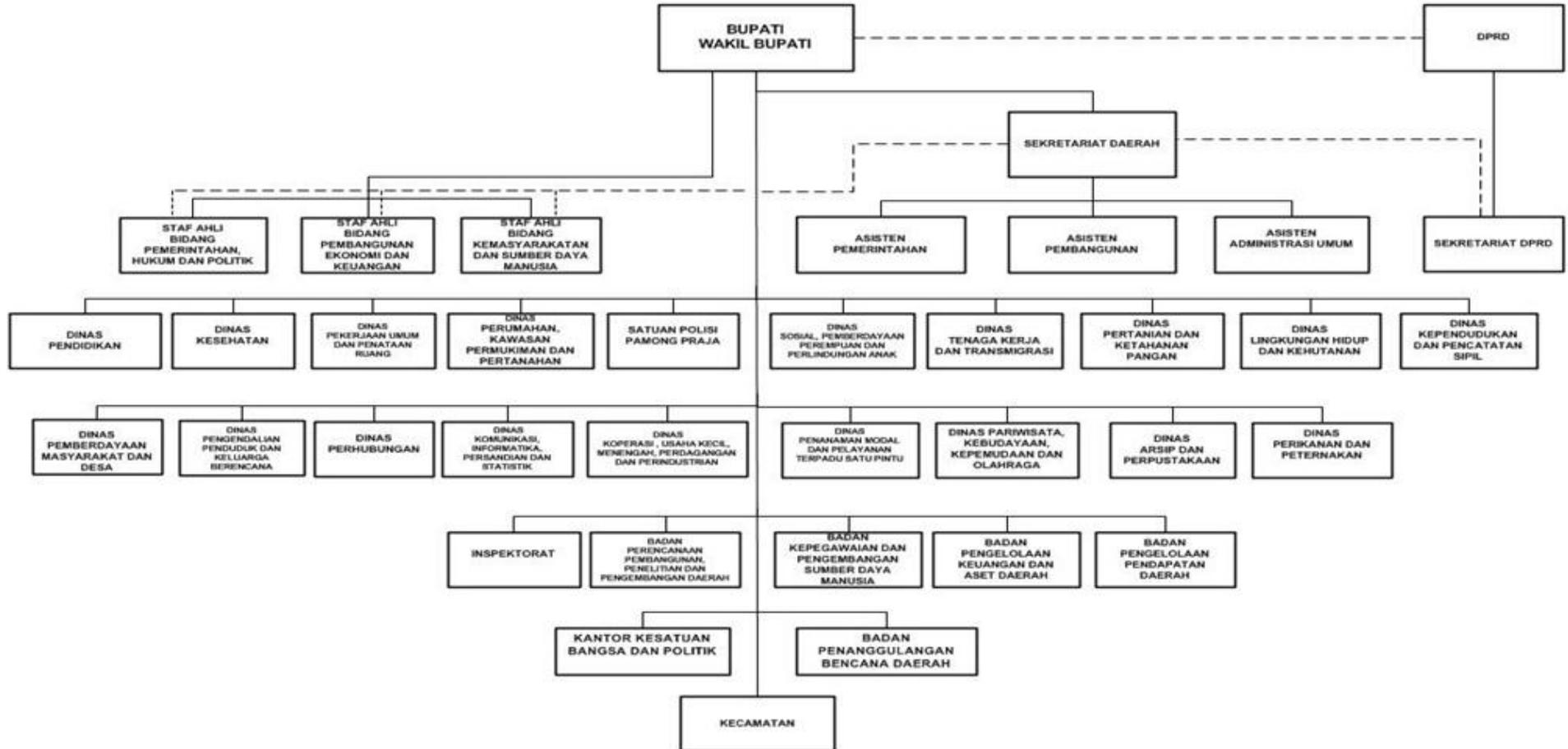
Sumber : *Bagian Organisasi Setda kabupaten Sumedang*

Adapun Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut : Gambar 1.4 Gambar Bagan Struktur Organisasi



# STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 38 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



Sumber Bagian Organisasi SETDA Sumedang Tahun 2018

### 1.1.3 SDM ASN pemerintah Kabupaten Sumedang

Pada akhir tahun 2017 jumlah PNS Kabupaten Sumedang golongan I sebanyak 70 orang, golongan II sebanyak 1.337 orang, golongan III sebanyak 4.681 dan golongan IV sebanyak 4.658 orang sesuai dengan tabel 1.6 halaman 14,.Upaya yang dilakukan dalam mengelola data base ASN Kabupaten Sumedang salah satunya dilakukan melalui Teknologi Informatika DBMS (Data Base Manajemen Sistem). SIMPEG Kabupaten Sumedang merupakan aplikasi berbasis web untuk pengelolaan data pegawai yang dikembangkan sejak tahun 2009. SIMPEG tersebut merupakan hasil perancangan ulang dari aplikasi sebelumnya agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan akses SIMPEG oleh SKPD, maka dikembangkan secara online, dan telah dapat diakses oleh seluruh SKPD, namun kewenangan SKPD masih sebatas melihat data tanpa bisa merubah data.

SIMPEG yang tersedia masih banyak faktor penghambat diantaranya kurangnya komitmen yang kuat dari seluruh jajaran SKPD untuk menjaga kualitas dan kuantitas data ASN dan kurangnya personil yang khusus mengelola data pegawai ASN. Diperlukan langkah langkah untuk menindaklanjuti masalah yang ada yaitu diperlukan pergantian server SIMPEG lama dengan server baru untuk menunjang kinerja pengolahan data.

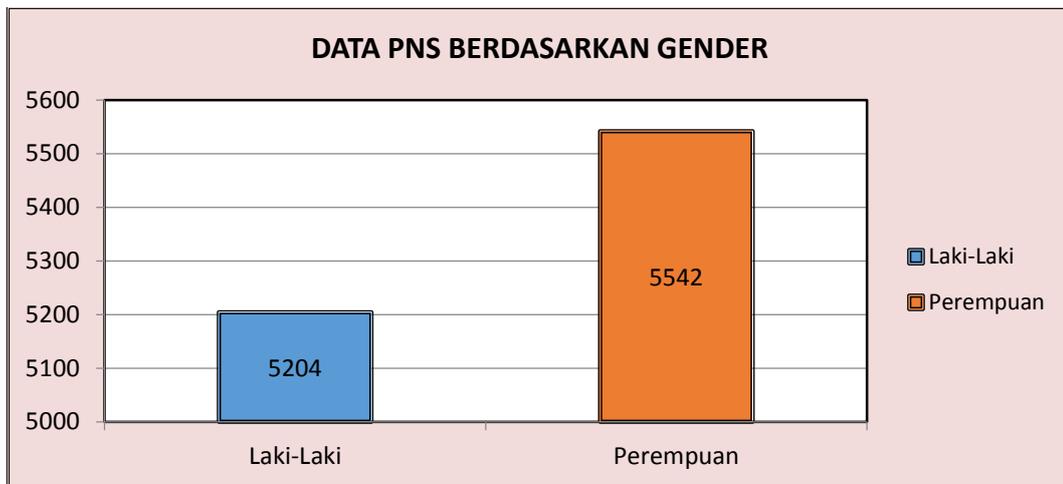
Berikut ini adalah data perkembangan ASN berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang Bersumber dari BKPSDM Kabupaten Sumedang Tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Data PNS Kabupaten Sumedang Berdasarkan Gender

No.	Gender	Jumlah
1	Laki-laki	5.204
2	Perempuan	5.542
	Jumlah	10.746

Sumber : SIMPEG BKPSDM SUMEDANG 2018

Gambar Grafik 1.5  
Data PNS Berdasarkan Gender



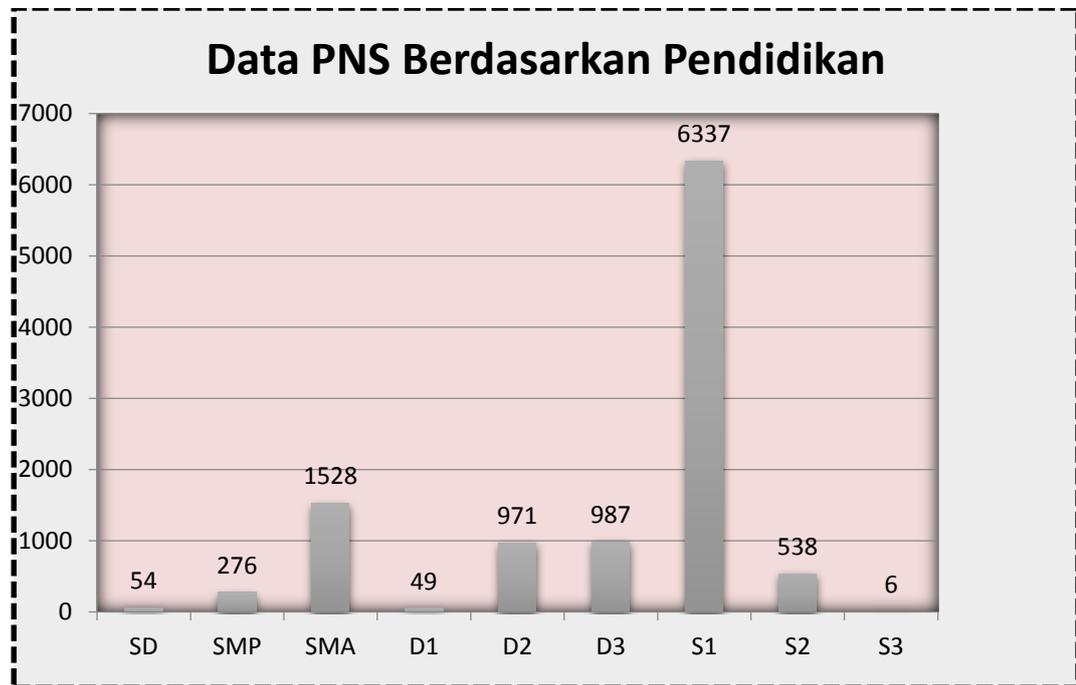
Sumber : SIMPEG BKPSDM SUMEDANG 2018

Tabel 1.5  
Data PNS Kabupaten Sumedang Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	54
2	SMP	276
3	SMA	1.528
4	D1	49
5	D2	971
6	D3	987
7	D4/S1	6.337
8	S2	538
9	S3	6
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.746</b>

Sumber : SIMPEG BKPSDM SUMEDANG 2018

Gambar Grafik 1.6  
Data PNS Berdasarkan Pendidikan



Sumber : SIMPEG BKPSDM SUMEDANG 2018

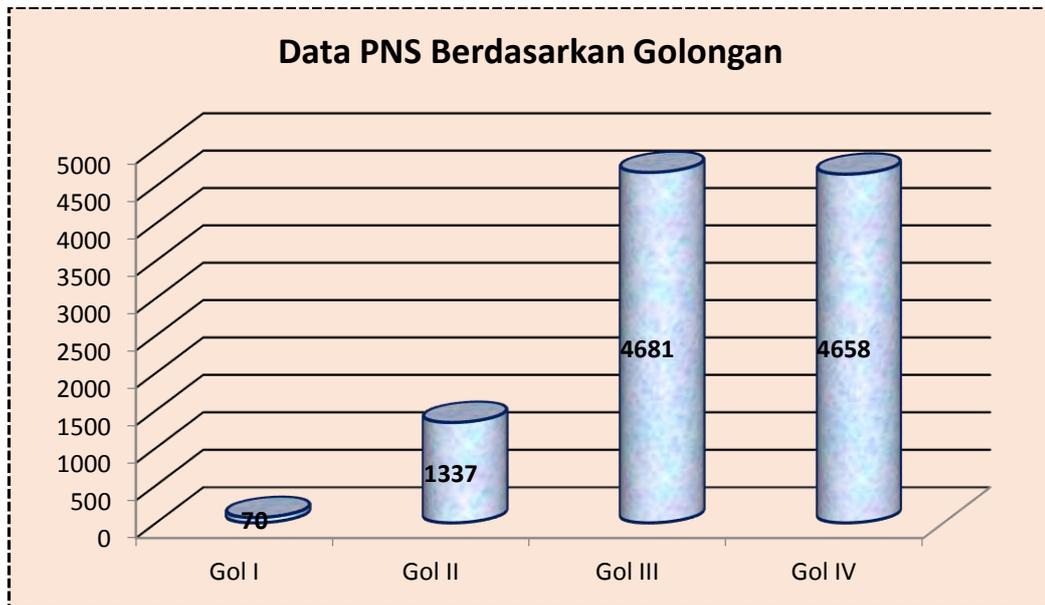
Tabel 1.6

Data PNS Kabupaten Sumedang Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	I	70
2	II	1.337
3	III	4.681
4	IV	4.658
	Jumlah	10.746

Sumber : SIMPEG BKPSDM SUMEDANG 2018

Gambar Grafik 1.7  
Data PNS Berdasarkan Golongan



Sumber : SIMPEG BKPSDM SUMEDANG 2018

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja;
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018;
- h. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018;
- i. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018;
- k. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menegaskan bahwa instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemberi mandat dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kerja instansi pemerintah, baik secara triwulan maupun tahunan.

Selanjutnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengemukakan bahwa tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian laporan ini memuat sampai sejauhmana capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengimplementasikan indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sumedang yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2018, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 maupun komitmen Kepala Daerah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai

jaminan adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan klarifikasi atas capaian kinerja yang akan dan seharusnya dicapai guna terwujudnya organisasi yang akuntabel sebagai wujud upaya perbaikan yang berkelanjutan terhadap peningkatan kinerja secara progresif Pemerintah Kabupaten Sumedang dimasa yang akan datang.

#### **1.4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Permasalahan dan isu srategis Kabupaten Sumedang Tahun 2018 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Masih tingginya tingkat kemiskinan khususnya kategori sangat miskin dan hampir miskin.
- 2) Masih tingginya angka pengangguran
- 3) Rekrutmen dan promosi pegawai negeri sipil yang belum sesuai aturan
- 4) Profesionalisme dan kesejahteraan pegawai negeri sipil yang masih rendah.
- 5) Biaya pendidikan cenderung masih dirasakan tinggi oleh orang tua siswa.
- 6) Beratnya tekanan lingkungan hidup dan kebencanaan.
- 7) Kualitas infrastruktur jalan yang rendah.
- 8) Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan yang masih terbatas.
- 9) Rendahnya perlindungan serta pemberdayaan petani.
- 10) Lemahnya kelembagaan dan aturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya air.
- 11) Terbaikannya sistem irigasi lahan pertanian.
- 12) Pengelolaan infrastruktur pasar yang kurang proporsional.
- 13) Kurang tertib dan berkembangnya sistem jaringan transportasi.
- 14) Sikap pelayan publik yang belum mencerminkan pelayanan prima.
- 15) Belum terselesaikannya permasalahan warga yang terkena genangan proyek Waduk Jatigede.

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sumedang, isu-isu strategis yang harus diangkat dalam perencanaan Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Perluasan dan peningkatan kualitas infrastruktur.
- 2) Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pemberdayaan dalam perekonomian.
- 3) Reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik.

- 4) Keterjangkauan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan IPTEK, dan daya saing SDM.
- 5) Kemudahan akses pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat dan lingkungan yang bersih.
- 6) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan menjadi motor kemajuan ekonomi.
- 7) Ketahanan pangan dan energi daerah.
- 8) Pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
- 9) Kelestarian Budaya dan kemajuan Pariwisata.
- 10) Dampak sosial ekonomi pembangunan Waduk Jatigede dan Tol CISUMDAWU.

## 1.5. Sistematika Penyusunan LKIP Tahun 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menguraikan capaian-capaian kinerja selama tahun anggaran 2018. Capaian tersebut kemudian diperbandingkan dengan variabel yang terdapat dalam RPJMD yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya diperjanjikan dalam Penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Melalui operasional variabel tersebut, maka kerangka sistematika penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

Menjelaskan gambaran umum daerah, landasan hukum aspek strategis, permasalahan dan isu strategis, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan LKIP;

**BAB 2 : PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2018;

**BAB 3 : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018**

Menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja organisasi, perbandingan capaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan serta alternatif solusi, penggunaan sumber daya, yang menunjang pencapaian sasaran, dan akuntabilitas keuangan Tahun 2018;

**BAB 4 : PENUTUP**

Menjelaskan simpulan dan langkah perbaikan kinerja pada tahun mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya;

### LAMPIRAN –LAMPIRAN

## BAB 2

### PERENCANAAN KINERJA



#### 2.1 Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

##### A. Perspektif Pembangunan Nasional 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, bahwa dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Secara umum strategi pembangunan nasional menggariskan hal-hal antara lain, norma pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
- b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan;
- c. Memberikan perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- d. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA.

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan nasional tahun 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

- 1) Sasaran Makro;
- 2) Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- 3) Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;
- 4) Sasaran Dimensi Pemerataan;
- 5) Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;
- 6) Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

## **B. Perspektif Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, bahwa dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa Barat, maka visi tahun 2013-2018 yaitu "***Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua***".

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Maju** : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.
- Sejahtera** : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.
- Untuk Semua** : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi Pertama, ***Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing***. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi

Misi Kedua, ***Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan***. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Misi Ketiga, ***Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik***. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota.

Misi Keempat, ***Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan***. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Misi Kelima, ***Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal***. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal.

Untuk mendukung tujuan dan pencapaian sasaran misi, kebijakan umum pembangunan Jawa Barat diarahkan untuk :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia Jawa Barat;
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan dimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal;
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik dimaknai melalui kebijakan penyelenggaraan good governance yang bermutu, akuntabel, toleran, dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas, dan pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal dimaknai melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal.

### **C. Perspektif Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018**

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018 adalah: **“Pada Tahun 2018 Sumedang Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri dan Agamis (Senyum Manis)”**

Penjelasan dari visi jangka menengah tersebut adalah sebagai berikut:

**SEJAHTERA** adalah kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rendahnya kemiskinan (persentase), rendahnya indeks pemerataan (Gini Coefficient), dan berkurangnya kasus kejahatan.

**NYUNDA** adalah karakter masyarakat Kabupaten Sumedang yang dilandasi filosofi dan nilai-nilai kesundaan sebagai pengungkit pembangunan. Ditandai dengan banyaknya kegiatan-kegiatan kebudayaan, partisipasi dalam kegiatan kebudayaan dan kepariwisataan.

**MAJU** adalah kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dan hasil-hasil pembangunan, ditandai dengan meningkatnya PDRB (pertumbuhan ekonomi).

**MANDIRI** adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mengelola potensi sumberdaya yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kearifan lokal sehingga memiliki daya saing untuk mencapai kesejahteraan. Ditandai dengan meningkatnya PAD (kapasitas fiskal), meningkatnya kerja sama pemerintah-swasta-akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya indeks adaptasi teknologi.

**AGAMIS** adalah sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal).

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018 adalah:

1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas demokrasi
2. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah
5. Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang, dapat dijelaskan bahwa hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan adalah sebagaimana yang digambarkan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1  
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan  
Visi : Pada Tahun 2014-2018 Sumedang Senyum Manis

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi	1.1. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan publik 1.2. Mewujudkan kualitas demokrasi	1.2.1. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif 1.2.2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah
2. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	2.1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang	2.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan 2.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2.1.3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	3.1. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas	3.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah 3.1.2. Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru
4. Mengembangkan perekonomian Kabupaten Sumedang yang berdaya saing dan berkeadilan, serta memberdayakan dan melindungi kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah	4.1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	4.1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang 4.1.2. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat

5. Mengembangkan lingkungan Kabupaten Sumedang yang aman, nyaman, dan lestari berbasis budaya dan nilai-nilai kesundaan sebagai daya ungkit pembangunan	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan nilai-nilai kesundaan di Kabupaten Sumedang	5.1.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan
---	---	---

Tabel 2.2

### Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Sumedang

<b>RKPD 2018</b>	<b>PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2014-2018</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Pemberdayaan dalam Perekonomian;</li> <li>2. Perluasan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur ;</li> <li>3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Menjadi Motor Kemajuan Ekonomi;</li> <li>4. Dampak sosial ekonomi pembangunan Waduk Jatigede dan Tol Cisumdawu;</li> <li>5. Ketahanan Pangan dan Energi Daerah;</li> <li>6. Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat;</li> <li>7. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik;</li> <li>8. Keterjangkauan, Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, Pengembangan IPTEK, dan Daya Saing SDM;</li> <li>9. Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan, Perilaku Hidup Sehat, dan Lingkungan yang Bersih;</li> <li>10. Kelestarian Budaya, dan Kemajuan Pariwisata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur ;</li> <li>2. Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Pemberdayaan dalam Perekonomian;</li> <li>3. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik;</li> <li>4. Keterjangkauan, Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, Pengembangan IPTEK, dan Daya Saing SDM;</li> <li>5. Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan, Perilaku Hidup Sehat, dan Lingkungan yang Bersih;</li> <li>6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Menjadi Motor Kemajuan Ekonomi;</li> <li>7. Ketahanan Pangan dan Energi Daerah;</li> <li>8. Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat;</li> <li>9. Kelestarian Budaya, dan Kemajuan Pariwisata ;</li> <li>10. Dampak sosial ekonomi pembangunan waduk Jatigede dan Tol Cisumdawu.</li> </ol>

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumedang pada tahun 2014-2018 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pemantapan pengelolaan infrastruktur meliputi antara lain jalan, jembatan, irigasi, air bersih dan infrastruktur daerah lainnya;
2. Pemantapan layanan dasar pada bidang pendidikan antara lain melalui pembebasan biaya pendidikan sampai dengan SLTP (pendidikan dasar), pembinaan dari sisi akhlak/moral dan nilai-nilai budaya Sunda di masyarakat;
3. Peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan, antara lain melalui pengembangan jaminan pelayanan kesehatan gratis dan peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan;
4. Pemantapan pengelolaan layanan dasar bidang ekonomi antara lain diprioritaskan pada upaya peningkatan daya beli masyarakat, penanggulangan kemiskinan (pro poor), perluasan kesempatan kerja (pro job), serta peningkatan ketersediaan pangan;
5. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah dan desa serta kualitas jati diri aparatur pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sumedang sebagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
6. Melaksanakan komitmen pembangunan berkelanjutan yang sifatnya *multi years* dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, serta penanggulangan dampak sosial ekonominya, antara lain dalam rangka pembangunan Tol Cisumdawu, Waduk Jatigede;
7. Pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang berbasis budaya Sunda;
8. Mengoptimalkan penataan kawasan perkotaan ibu kota Kabupaten Sumedang;
9. Mengoptimalkan pendayagunaan pagu indikatif kecamatan (PIK), dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah serta bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dalam kerangka integrasi pembangunan daerah;
10. Peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang berkualitas;
11. Penumbuhkembangan partisipasi sektor swasta, perguruan tinggi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah;
12. Peningkatan promosi dan investasi daerah serta penciptaan iklim usaha yang kondusif;
13. Pengembangan daya tarik wisata daerah;
14. Program unggulan antara lain Bendung Rengrang, sport center, Jalan Lingkar Selatan, dan Pembangunan pusat pemerintahan seluas 23 Ha;
15. Alokasi Dana Desa (ADD) dengan pemberlakuan UU Desa;

16. Penguatan kapasitas sumber daya aparatur desa;
17. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan tahapan.

#### D. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan Program Prioritas Tahun 2018

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta fokus-fokus sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, dan Program Unggulan Kepala Daerah periode Tahun 2014-2018, maka Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 adalah **“Akselerasi Pemerataan Pembangunan Melalui Optimalisasi Pengembangan Potensi Wilayah”**, dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan Program Prioritas  
Tahun 2018 RPJMD

No.	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)	Program Prioritas Tahun 2018 (RPJMD)	Kinerja		Perangkat Daerah (PD)
			Indikator	Target	
1	Prioritas 1 : Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang tertata	1 wilayah	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
		Program Peningkatan sarana dan prasarana bidang peternakan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana bidang peternakan	10%	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Program Peningkatan pengelolaan hasil produksi peternakan	Peningkatan kualitas produk olahan peternakan	1 unit usaha	Dinas Perikanan dan Peternakan
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya kualitas SDM KUMKM berbasis sumber daya lokal	100 orang	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Meningkatnya Jaringan Usaha, kemitraan dan fasilitasi PIRT dan Halal	100 UKM	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
			Terwujudnya fasilitasi bantuan permodalan dan sarana usaha KUMKM	100 KUMKM	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2	<p>Prioritas 2:</p> <p>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang</p>	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Peningkatan pengusaha industri dan perdagangan di Kabupaten Sumedang yang menguasai prosedur ekspor dan impor	30 orang	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
			Bertambahnya Jumlah promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah	4 kali	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
			Terbangunnya lembaga dan kerjasama kemitraan antara Pelaku usaha besar/asosiasi pengusaha dengan Pelaku usaha kecil/UKM	1 kali	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	Terlaksananya sistem resi gudang untuk komoditi unggulan daerah	100%	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
			Meningkatnya kualitas SDM pengelola dan pedagang Pasar Tradisional	175 orang	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
			Meningkatnya Sarana dan prasarana pasar yang representatif	75%	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Sinkronisasi kebijakan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	6 lembaga	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
			Meningkatnya Iklim Usaha perdagangan yang kondusif	95%	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional	Meningkatnya omset pasar tradisional 1 persen per tahun	Rp. 1.066.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Peningkatan produksi padi sebesar 2% per tahun	564.033 ton GKG	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Peningkatan produksi palawija sebesar 2% per tahun	269.427 ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Peningkatan produksi hortikultura unggulan dan prospektif daerah	262.000 ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya kemitraan usaha tani	17 Kelompok Tani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan lahan produktif perkebunan	73 ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Program Pengembangan Agribisnis	Frekuensi fasilitasi kemitraan usaha agribisnis komoditas perkebunan	1 kel	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian lainnya	Ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur perkebunan	21 kel	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan produksi hasil peternakan	Persentase peningkatan produksi daging, telur dan susu a. Daging b. Telur c. Susu	4% 14.000 ton 1.432 ton 16.138 ton	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Persentase pengendalian tingkat kematian ternak dan pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan Zoonosis	100%	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Peningkatan Kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat keamanan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	100%	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal. memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal	3 Perda/Perbup/Informasi Peluang Usaha	Dinas PMPTSP
		Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggungjawab penanaman modal	100%	Dinas PMPTSP
	Program Peningkatan promosi dan kerjasama	Terselenggaranya kerjasama kemitraan antara UMKM dengan pemerintah	3 kali	Dinas PMPTSP
		Meningkatnya citra sumedang sebagai daerah tujuan penanaman modal dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif	2 kali	Dinas PMPTSP

		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal	100%	Dinas PMPTSP
		Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi UMKM	Terciptanya akselerasi pasar yang kuat bagi KUMKM	130 KUMKM	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
			Meningkatnya Kualitas Pemasaran dan jaringan usaha UKM yang kompetitif	240 UKM	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Jatidiri Koperasi dan Akses Kemitraan Koperasi	72 Koperasi	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan 205 per tahun	100%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Destinasi wisata unggulan yang dikembangkan	1 lokasi	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Peningkatan jumlah usaha Industri yang menggunakan teknologi yang lebih maju	5 kelompok	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan jumlah IKM yang dilatih dalam pengelolaan usaha dan legalitas usaha	5 kelompok	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
			Peningkatan jumlah perajin/pengusaha dalam industri kreatif yang berbasis budaya unggulan	20 orang	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Pengembangan sistem dan jaringan informasi Perindustrian	26 kecamatan	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
			Peningkatan Jumlah promosi produk IKM yang diikuti	3 kali	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin
3	Prioritas 3 : Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah sarana dan prasarana Pasar Hewan Lokal yang terpelihara	-	Dinas Perikanan dan Peternakan
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana Pasar Hewan Regional	10%	Dinas Perikanan dan Peternakan
4	Prioritas 4 : Meningkatnya kualitas infrastruktur	Prgram Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan serta penggunaan produk dalam negeri	30 orang	Dinas Koperasi, UKM, Dagperin

wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah	Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Terwujudnya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan per tahun dilaksanakan pada 30% total panjang jalan	17,97 km	Dinas PUPR
	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Ketersediaan data base jalan dan jembatan	100%	Dinas PUPR
	Program Pengendalian Banjir	Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang terehabilitasi	80%	Dinas PUPR
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. rawa. dan jaringan pengairan	Luasan daerah irigasi (DI) yang terlayani air irigasi	24.022,2 ha	Dinas PUPR
	Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	Ketersediaan MCK	85%	Dinas PUPR
	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Berkurangnya jumlah titik genangan	15%	Dinas PUPR
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Ketersediaan air baku	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Lainnya	Ketersediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pertanian - Alsintan - Jaringan Irigasi Perdesaan - Jalan Usaha Tani	250 unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			500 ha	
			10 km	
	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Peningkatan infrastruktur di wilayah strategis	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	Dinas Perhubungan
		Ketersediaan Peraturan/Dokumen Pendukung Bidang Perhubungan	100%	Dinas Perhubungan
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Ketersediaan saluran drainase/gorong-gorong di Kawasan IPP	-	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

5.	Prioritas 5 : Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	91.50%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Persentase Penguatan Cadangan Pangan	79.80%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah	100.00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	100.00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95.70%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100.00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	75.00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Bertambahnya jumlah kelompok tani yang menerapkan pengelolaan pasca panen dan perbaikan mutu pengelolaan hasil pertanian	5 Kelompok tani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Program Pengembangan budidaya perikanan	Peningkatan produksi ikan : a. Ikan konsumsi b. Ikan Hias c. Benih Ikan	24.000 ton 598.112 ekor 211.629 ribek	Dinas Perikanan dan Pternakan
		Program Peningkatan sarana dan prasarana bidang perikanan	Persentase peningkatan sarana prasarana produksi perikanan	10%	Dinas Perikanan dan Pternakan
Program Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan	Peningkatan tingkat konsumsi ikan	18.40 kg/kapita	Dinas Perikanan dan Pternakan		
Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	Peningkatan kualitas produk olahan perikanan	5 unit usaha	Dinas Perikanan dan Pternakan		
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Jumlah kelompok usaha aneka Hasil Hutan Non Kayu		DLHK		
6	Prioritas 6 : Meningkatnya	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tercapainya angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini		Dinas Pendidikan

kualitas penyelenggaraan pendidikan		Angka Partisipasi Kasar (APK)		Dinas Pendidikan	
		- PAUD (TK/RA)	94,50%		
		Angka Partisipasi Murni (APM)		Dinas Pendidikan	
		- PAUD (TK/RA)	65,93%		
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Tercapainya Angka Partisipasi Pendidikan Dasar		Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar (APK)		Dinas Pendidikan
			- SD/MI sederajat	120.95%	
			- SMP/MTs sederajat	108.14%	
			Angka Partisipasi Murni (APM)		Dinas Pendidikan
			- SD/MI sederajat	106.74%	
			- SMP/MTs sederajat	105.67%	
			Persentase SD/MI Gratis	100%	Dinas Pendidikan
			Persentase SMP/MTs Gratis	100%	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan Menengah		Tercapainya Partisipasi Pendidikan Menengah	
			Angka Partisipasi Sekolah		Dinas Pendidikan
			- SMA/MA sederajat		
			- SMK		
			Angka Partisipasi Kasar (APK)		Dinas Pendidikan
			- SMA/MA Sederajat		
			- SMK		
	Angka Partisipasi Murni (APM)			Dinas Pendidikan	
	- SMA/MA Sederajat				
	- SMK				
	Persentase SMA/SMK/MA Gratis			Dinas Pendidikan	
Program Pelayanan Pendidikan Non Formal			Tercapainya Partisipasi Pendidikan Non Formal		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kejar Paket A	2.80%	Dinas Pendidikan	

		Angka Partisipasi Kejar Paket B	7.00%	Dinas Pendidikan	
		Angka Partisipasi Kejar Paket C	7.00%	Dinas Pendidikan	
		Angka Melek Huruf	98.32%	Dinas Pendidikan	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Tercapainya Kinerja Pendidikan		Dinas Pendidikan	
		Angka RLS	8.49%		
		Angka tingkat pendidikan yang ditamatkan		Dinas Pendidikan	
		- SD/MI	100%		
		- SMP/MTs	100%		
		- SMA/MA	100%		
		- SMK	100%		
	Program Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kelayakan Guru SD	96,43%	Dinas Pendidikan	
		Kelayakan Guru SMP	98,98%	Dinas Pendidikan	
		Kelayakan Guru SMA	98,98%	Dinas Pendidikan	
		Kelayakan Guru SMK	98,98%	Dinas Pendidikan	
	Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan kesehatan	Rasio sarana praktek/mahasiswa	1:5 rasio	Akademi Keperawatan	
	Pengembangan SDM dalam bidang kesehatan	Jumlah keluarga yang terbina dalam bidang kesehatan	120 KK	Akademi Keperawatan	
7.	Prioritas 7 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Akreditasi sarana dan tenaga kesehatan di Puskesmas	25 Unit	Dinas Kesehatan
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Jumlah Puskesmas	36 unit	Dinas Kesehatan
			Jumlah Puskesmas Perawatan	16 unit	Dinas Kesehatan
			Jumlah Puskesmas PONED	32 unit	Dinas Kesehatan
			Jumlah Rumah Sakit Tanpa Kelas		Dinas Kesehatan
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan masyarakat	UPTD yang mendapatkan biaya penunjang kegiatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar	100%	Dinas Kesehatan

	Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi syarat		Dinas Kesehatan
	Persentase Penduduk/RT yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas		Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan PHBS di Rumah tangga	70%	Dinas Kesehatan
	Cakupan Desa siaga aktif Purnama	40%	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan penduduk yg menggunakan jamban sehat	75%	Dinas Kesehatan
	Cakupan Desa yg melaksanakan STBM	80 Desa	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan pemeliharaan kesehatan berbasis asuransi	50%	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Tersedianya data terpilah perspektif gender (berdasarkan jenis kelamin)	100%	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	Penemuan dan Penanganan penderita penyakit menular:		Dinas Kesehatan
	Penemuan pasien baru TB BTA + (CDR)	80%	Dinas Kesehatan
	Penemuan penderita Pneumoni pada Balita	86%	Dinas Kesehatan
	Penanganan penderita HIV/AIDS	100%	Dinas Kesehatan
	Penanganan penderita malaria	100%	Dinas Kesehatan
	Penanggulangan penyakit DBD : - Penderita DBD yang ditangani	100%	Dinas Kesehatan
	- Case Fatality Rate (CFR) Desa/Kel UCI	<1% 100%	Dinas Kesehatan

			Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4	96%	Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan Balita	80%	Dinas Kesehatan
			Kunjungan neonatus KN3	96%	Dinas Kesehatan
			Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	72%	Dinas Kesehatan
		Program Jaminan Persalinan	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	Dinas Kesehatan
			Cakupan MP ASI anak usia 6 - 24 bln gakin	100%	Dinas Kesehatan
			Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	100%	Dinas Kesehatan
			Persentase balita gizi buruk	<1%	Dinas Kesehatan
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3.5%)	2.50%	Dinas PPKB
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga	20%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
8	Prioritas 8 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Penduduk bernomor induk kependudukan (NIK) Nasional	100%	Disdukcasip
			Rasio kepemilikan kartu keluarga per satuan kepala keluarga	99%	Disdukcasip
			Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk wajib KTP	99%	Disdukcasip
			Rasio bayi berakte kelahiran	80%	Disdukcasip
			Rasio pasangan berakte menikah	80%	Disdukcasip
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk yang terlindungi jaminan pemeliharaan kesehatan berbasis asuransi	50%	Dinas Kesehatan

	Pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke rumah sakit pada setiap unit	100%	RSUD
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Jumlah Tempat tidur pasien	20 unit	RSUD
Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	Tersusunnya dokumen basis data potensi daerah, dokumen daya tarik daerah, dokumen strategi pemikat investor dan dokumen prosedur investasi	100%	DPMPSTP
	Peningkatan pengetahuan masyarakat, dunia usaha dalam bidang penanaman modal	1 (satu) kali	DPMPSTP
Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum/hari	49.000 orang	Dinas Perhubungan
Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas	237 kejadian	Dinas Perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Ketersediaan fasilitas lalu lintas	70%	Dinas Perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Terpelihara	70%	Dinas Perhubungan
Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Peningkatan KIR angkutan umum	3.600 kendaraan	Dinas Perhubungan
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS skala Kabupaten Sumedang yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	Persentase PMKS skala Kabupaten Sumedang yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar	Persentase PMKS skala Kabupaten Sumedang yang menerima program	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan

		pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase PMKS skala Kabupaten Sumedang yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase panti sosial skala Kabupaten Sumdang yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Sosial bagi PMKS yang termasuk dalam kriteria Korban Bencana.	Persentase korban bencana skala Kabupaten Sumedang yang menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Korban Bencana skala Kabupaten Sumedang yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100%	
	Program Pembinaan dan latihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia tidak Potensial yang telah menerima jaminan sosial	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	100%	Disnakertrans
		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100%	Disnakertrans
		Besaran Pengujian Peralatan Perusahaan	100%	Disnakertrans
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu		
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun (3.5%)	2.50%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (65%)	74,28%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR Yang Mandiri	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%	4,5%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	93,29%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pengembangan Model Operasional BKB. Posyandu- Paud	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (70%)	93,29%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Frekuensi pelaksanaan diseminasi informasi Nasional	26 Kecamatan	Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik
Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal dan BTS	- Radio/TV lokal/BTS	Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik
Pembinaan Telematika Daerah	Jumlah Wilayah, Media Elektronik dan Media Komunikasi yang Terbina	79.42%	Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik
Pengembangan komunikasi, informasi, dengan media masa	Jumlah Jaringan Komunikasi Stasioner	7.340 jaringan	Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik

	Jumlah Jaringan Komunikasi Mobile	400.000 jaringan	Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik	
	Rasio Wartel/Warnet terhadap Penduduk	0.22 rasio	Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik	
	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya data, informasi dan administrasi pertanahan	1 (satu) paket	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Terfasilitasinya Kebutuhan lahan untuk Kepentingan umum	1(satu) paket	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Frekuensi kriminalitas di dusun/desa	0 (nol) kasus	Satpol PP
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan patroli siaga, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (3 x Patroli dalam 1 hari)	70%	Satpol PP
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (1 orang setiap RT atau sebutan lainnya)	75%	Satpol PP
	Program Pemeliharaan Keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak criminal	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	90%	Satpol PP
	Program pembinaan dan pengembangan bidang energi baru terbarukan	Berkembangnya Energi Alternatif di masyarakat	20 KK	Dinas Perhubungan
	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi	-	
		Ketersediaan lampu penerangan jalan umum	-	
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase pengawasan pemegang IUP	-	
	Program pengawasan dan penertiban kegiatan	Menurunnya resiko bencana di daerah rawan bencana geologi	-	

		rakyat yang berpotensi merusak lingkungan			
		Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian	Jumlah calon lokasi penerima transmigran	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Transmigrasi local	Penanganan pemindahan penduduk miskin asal wilayah genangan jatigede melalui pola sisipan pedesaan	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Transmigrasi Regional	Penanganan pemindahan penduduk miskin asal wilayah genangan jatigede melalui pola resseltemen (penerima manfaat Cirebon, Majalengka, Indramayu)	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Besaran Kasus diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	100%	Disnakertrans
9.	Prioritas 9 : Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	Pengembangan aplikasi sistem dan konten telematika	Peningkatan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui electronic government	55%	Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik
			Jumlah Pengunjung Web Site <a href="http://www.sumedangkab.go.id">www.sumedangkab.go.id</a>	240.000 orang	Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik
		Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika	60%	Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik
		Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika	Pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	365 hari	Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik
			Jumlah kegiatan yang terinformasikan melalui Layanan M-CAP	100 kali	Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Peningkatan jumlah kecamatan tanggap bencana	13 Kecamatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program peningkatan Kualitas Kebijakan manajemen Pemerintahan	Persentase kualitas kebijakan manajemen pemerintahan	100%	Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama	75 Daerah/Pihak Ke-3	Sekretariat Daerah
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien	77,26 %	Sekretariat Daerah
Program Penerapan dan penegakan hukum	Pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima	100%	Sekretariat Daerah
Program Penataan Sarana dan Prasarana Hukum	Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Publik dibidang Informasi Hukum (JDIH)	100%	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Ketercapaian fungsi pengawasan DPRD	100%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Ketercapaian fungsi legislasi DPRD	100%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Ketercapaian fungsi budgeting DPRD	100%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio APBD terhadap PDRB	13,04%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Tersedianya data dan informasi keuangan	14 Perda/Perbup/Dok	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Tersedianya data penggajian pegawai	63 SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Tersedianya dokumen pelaksanaan APBD	2 (dua)Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah	4 (empat) Dokumen	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data APBD Hasil evaluasi	4 (empat) Raperda/Raperbup	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	26 orang	Inspektorat
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan-kebijakan KDH	Menurunnya jumlah temuan terhadap ketaatan dan sistem pengendalian internal	50 temuan	Inspektorat
Program Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan	Tersedianya sistem dan prosedur pengawasan	1 (satu) Paket	Inspektorat
Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip	Jumlah arsip daerah yang terpelihara	37.500 dokumen	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Penelusuran arsip yang bernilai sejarah	Jumlah dokumen yang bernilai sejarah	-	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Peningkatan kualitas layanan informasi kearsipan	Terlayannya SKPD, Desa dan masyarakat dalam hal informasi kearsipan	18 SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Pengembangan khasanah kearsipan	Jumlah SKPD yang menyerahkan arsip statis	2 (dua) SKPD	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Ketersediaan Peraturan Bupati tentang Tata Kearsipan	-	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan	37.552 orang	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Jumlah Perpustakaan	546 Perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Jumlah Bahan Pustaka	339.200 eksemplar	Dinas Arsip dan Perpustakaan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Frekuensi konflik antar suku	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Frekuensi Konflik antar umat beragama/Keyakinan	-	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

10	Prioritas 10 : Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Ketersediaan sistem pendukung kediklatan	3 (tiga) paket	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	517 orang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyusunan regulasi kepegawaian	2 (dua) paket	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Frekuensi Penataan dan Penempatan Pegawai dalam jabatan	19 kali	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan dan kenaikan pangkat	2.225 orang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai, ijin perceraian dan perkawinan	100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Jumlah Pelayanan Pengelolaan administrasi Kepegawaian	7.322 orang	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Terlaksananya rekrutmen pegawai	2 kali	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Program Pengembangan Data dan Informasi	Tersedianya Data Base Pegawai	1 paket
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Intensitas Fasilitas Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	7 (tujuh) paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pengelola kearsipan	Ketersediaan jumlah arsiparis/pengelola arsip	157 orang	Dinas Arsip dan Perpustakaan
		Program Pengembangan/	Ketersediaan sarana/prasarana kearsipan	20 paket	Dinas Arsip dan Perpustakaan

		Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan			
		Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternakan dan perikanan	Jumlah aparatur / pelaku usaha peternakan dan perikanan yang mengikuti pelatihan teknis/magang, dsj.	10 orang	Dinas Perikanan dan Peternakan
			Persentase peningkatan data dan informasi	16%	Dinas Perikanan dan Peternakan
11.	Prioritas 11: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	30 Usaha/ Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Persentase luasan lahan yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan	100%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	5 (lima) pengaduan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara	20 Usaha/ Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan AMDAL UKL/UPL	10 (Sepuluh)Usaha/ Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah sungai yang terpantau kualitas airnya	6 sungai
			Jumlah titik pantau kualitas udara ambient	6 lokasi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Taman Kehati		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Jumlah mata air permanen	5 mata air	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah pengunjung yang mengakses data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	250 orang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	39%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Capaian Luas RTH (Ha)	156,37 ha	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Lahan Kritis terhadap Luas Wilayah Kabupaten Sumedang	0.64%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	16.67%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program perencanaan dan pengembangan hutan	Persentase Luasan Kawasan Hutan minimal yakni 30% dari luas wilayah	0.55%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program pengendalian air tanah	Ketersediaan air bersih yang bersumber dari air tanah	2 (dua) titik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
12.	Prioritas 12 : Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat	Pembinaan akhlak/moral masyarakat			Sekretariat Daerah
13.	Prioritas 13 : Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel	Program Pengembangan data statistik daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan	100%	PAPELITBANGDA
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan	100%	PAPELITBANGDA
		Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama pemda dengan perusahaan (CSR) dan perguruan tinggi	100%	PAPELITBANGDA
		Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan bidang sosial budaya	100%	PAPELITBANGDA

		Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan bidang infrastruktur	100%	PAPELITBANGDA
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian sasaran rencana menengah daerah dengan realisasi tahunan bidang ekonomi	100%	PAPELITBANGDA
		Program Pengembangan data/informasi	Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan yang dapat diakses	100%	PAPELITBANGDA
		Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis	100%	PAPELITBANGDA
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai RTRW	80%	PAPELITBANGDA
14.	Prioritas 14 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan	20%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
		Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah petugas perlindungan masyarakat (linmas)	4.137 orang	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah LSM, Ormas dan OKP	-LSM/Ormas/OKP	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Organisasi Politik Daerah	- Partai Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Frekuensi Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3 (tiga) Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Frekuensi Fasilitasi dan Evaluasi DBH Pajak Daerah, Retribusi Daerah bagi Desa dan ADD	2 (dua) Paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Frekuensi Fasilitasi Kegiatan Royongan	4 (empat) kali	Dinas Pemberdayaan

					Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan	Frekuensi Fasilitas peningkatan ekonomi masyarakat perdesaan	5 (lima) paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan	Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna, Perilaku Hidup Sehat, dan Lingkungan yang Bersih	3 (tiga) paket	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15.	Prioritas 15 : Lestarinya nilai-nilai kesundaan	Program pengembangan nilai budaya	Persentase peningkatan apresiasi masyarakat terhadap nilai budaya	20%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Program pengelolaan kekayaan budaya	Persentase peningkatan apresiasi masyarakat terhadap karya budaya	20%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan SKPD dalam setiap tahun Anggaran. Rencana kinerja tersebut, selain berfungsi sebagai alat kendali capaian kinerja organisasi juga merupakan instrumen dalam menilai keberhasilan kinerja organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran serta indikator kinerja organisasi yang akan dicapai pada tahun 2018, melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	Penilaian LAKIP	Peringkat	52,00	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4.856.380.920
					Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan	6.048.156.450
					Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	438.615.800
		Penilaian LPPD	Peringkat	3,00	Program Peningkatan Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
		Tingkat Kewajaran	Opini BPK	WTP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3.769.222.098
					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	205.193.600
					Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.816.500.000
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.954.014.500
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.675.388.650
					Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	686.270.000
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	101.150.000
					Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	35.846.000
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	243.988.000
Program Peningkatan Sarana Aparatur	790.862.200					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Program Pengembangan Data/Informasi	826.950.000
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23.325.000
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.909.920.900
					Program Pendidikan Kedinasan	1.014.480.000
					Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan)	
					Program Penerapan dan Penegakan Hukum	1.149.953.500
					Program Penataan Sarana dan Prasarana Hukum	210.123.500
					Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	105.000.000
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	15.993.525.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	205.790.500
					Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	
					Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan	280.000.000
					Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pelayanan Kearsipan SKPD	173.623.000
					Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Poin	77,26	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	715.238.800
					Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
					Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	240.262.000
					Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	591.200.000
					Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	220.000.000
					Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	230.000.000
					Program DAK Bidang Perhubungan	401.220.000
					Program Pembinaan Telematika Daerah	
					Program Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	817.963.000
					Program Pengembangan Aplikasi Sistem dan Konten Telematika	704.992.000
					Program Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika	70.000.000
					Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	95.000.000
					Program Penataan Administrasi Kependudukan	
					Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	250.000.000
					Program Perencanaan Pembangunan	
					Program Pengembangan Data/Informasi	120.421.700
					Program Kerjasama Pembangunan	100.000.000
					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.227.000.000
					Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	275.000.000
					Program Perencanaan Sosial dan Budaya	550.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	
					Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	88.000.000
					Program Penataan Perkotaan dan Pedesaan	2.810.000.000
					Program Perencanaan Tata Ruang	3.120.000.000
					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2.475.000.000
					Program Perencanaan Tata Ruang	90.000.000
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.721.112.000
					Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa	1.042.300.000
					Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa	140.000.000
					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
					Program Pendidikan Politik Masyarakat	
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	825.000.000
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	
					Program Peningkatan Aktifitas Perempuan dalam Pembangunan (P2WKKS)	188.440.000
					Program Penguatan Kelembagaan Gender dan Anak	350.000.000
					Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri	668.000.000
					Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	100.000.000
					Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	
					Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	147.000.000
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	283.050.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	796.422.000
					Program Pengembangan Komunikasi Informasi dengan Media Masa	
					Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	600.000.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	200.000.000
					Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.505.000.000
					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.271.036.000
					Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	15.000.000
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	84,42	Program Penyelenggaraan Pendidikan Pada BLUD	4.370.898.160
					Program Peningkatan Operasional Tingkat Satuan Pendidikan	
					Program Pendidikan Anak Usia Dini	350.000.000
					Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	7.092.000.000
					Program Pendidikan Menengah	6.390.200.000
					Program Pendidikan Non Formal	325.000.000
					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	670.000.000
					Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.282.166.000
					Program DAK Pendidikan	7.876.278.650
					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	430.500.000
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	Tahun	72,55	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.100.000.000
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	50.008.387.630

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	250.000.000
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat	507.500.000
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	700.000.000
					Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	1.169.689.816
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.519.122.000
					Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	20.012.992.810
					Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	8.835.640.461
					Program Kesehatan Remaja	350.000.000
					Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	100.000.000
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dan Remaja	
					Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	373.000.000
					Program Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat Bidang Kesehatan	13.909.995.595
					Program DAK Bidang Kesehatan	34.921.610.000
					Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	14.309.339.000
					Program DAK Bidang Kesehatan	4.141.185.000
					Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	144.397.387.037
					Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	178.000.019.418
					Program Keluarga Berencana	379.972.000
					Program pelayanan kontrasepsi	175.000.000
					Program DAK Bidang Keluarga Berencana	7.180.558.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
5.	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat	Prosentase penurunan kasus yang disebabkan masalah perbedaan agama/keyakinan	Prosentase	0	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
6.	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah	Prosentase Jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	86,1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	30.007.500.000
					Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	277.450.000
					Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2.050.000.000
					Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8.246.725.000
					DAK Bidang Infrastruktur Jalan	1.029.090.000
					Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	3.919.043.750
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	24.022,2	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	31.288.169.400
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	23.356.000.000
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Lainnya	3.717.404.200
					Program DAK PU Irigasi	2.278.020.000
					Program Pengembangan Data/Informasi ke PU-an	150.000.000
					Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	
					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang ke PU-an	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Program DAK Cipta Karya	3.830.870.000
					Program Lingkungan Sehat Perumahan	10.896.268.888
					Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	651.600.000
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	50.000.000
					Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Napidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	100.000.000
					Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	200.000.000
					Program Pembinaan dan Latihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	108.000.000
7.	Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru	Jumlah Kawasan Pengembangan Ekonomi	Kawasan	0		
8.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah dan Produktif	
					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	240.000.000
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja	635.600.000
					Program Pengembangan Kemitraan	
					Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	350.000.000
					Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	220.000.000
					Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	375.000.000
					Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat perdesaan	823.700.000
					Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	265.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Perdesaan	
					Program DAK Perdagangan Pasar	2.043.196.000
					Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	3.861.869.300
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil	300.000.000
					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	150.000.000
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	200.000.000
					Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.907.690.393
					Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial	450.000.000
					Program Perlindungan Tenaga kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	190.000.000
					Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	200.000.000
9.	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Poin	0.25	Program Peningkatan promosi dan kerjasama	525.000.000
					Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	390.000.000
					Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan	320.000.000
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	446.450.000
					Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
					Program Peningkatan Ketahanan	270.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Pangan (Pertanian/Perkebunan)	
					Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	75.000.000
					Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	
					Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	3.224.676.7000
					Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	437.760.000
					Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	100.000.000
					Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3.055.010.000
					Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	64.000.000
					Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian lainnya	13.154.359.495
					Program DAK Bidang Pertanian	6.791.996.000
					Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	75.000.000
					Program Pengembangan Data / Informasi Peternakan / Perikanan	
					Program Peningkatan Pengelolaan Hasil Produksi Peternakan	100.000.000
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peternakan dan Perikanan	75.000.000
					Program Pengembangan Budidaya Perikanan	850.000.000
					Program Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan	100.000.000
					Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	275.000.000
					Program Peningkatan Sarana/Prasarana Bidang Perikanan	200.000.000
					Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.477.500.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian lainnya	629.750.000
10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Persen	42,27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.242.649.000
					Program Pengembangan Agribisnis	
					Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	360.000.000
					Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2.116.994.100
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	670.000.000
					Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	453.000.000
					Program Peningkatan Pengendalian Polusi	150.000.000
					Program DAK Energi Pedesaan	
		Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persen	10,83	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	705.000.000
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	150.000.000
					Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.333.320.000
					Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
					Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.518.994.720
					Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.375.000.000
					Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	
					Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	4.005.561.112
					Program Pengendalian Air Tanah	568.610.600
					Program Pengembangan Nilai Budaya	431.719.000

## BAB 3

# AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

## 3.1 PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur, dan pengukurannya tidak semata-mata hanya kepada masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien serta hasil program dapat dimanfaatkan.

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan akuntabilitas. Untuk mengukur kinerja terutama keberhasilan pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil (outcome) pada sasaran digunakan

pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1  
SKALA PENILAIAN

SKALA PENILAIAN	KATAGORI PENILAIAN
>100	Sangat Baik
80 – 100	Baik
60 – 79	Cukup Baik
40 – 59	Kurang
< 40	Sangat Kurang

Hasil Penjumlahan Presentase :	.....	X 100 %	:
Jumlah Indikator	.....		

## A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang didasarkan pada pencapaian atas Visi Misi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 -2018 (**SENYUM MANIS**), yang dioperasionalkan kedalam **IKU (Indikator Kinerja Utama)** pemerintah Kabupaten Sumedang (Peraturan Bupati Sumedang Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2015 Tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018), yang kemudian dituangkan kedalam Penetapan **Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2018**.

Adapun Pencapaian Sasaran Kinerja Outcome Pemerintah Kabupaten Sumedang termuat dalam tabel 3.2 , yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Pemerintah kabupaten Sumedang Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018		Persentase Capaian (%)
				REALISASI	%	
1	2	2	4	5	6	7
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	Penilaian LAKIP	Interval 9-100	52,00	60,98	117,27	
	Penilaian LPPD	Interval 0-4	3,000	3,134	104,46	
	Tingkat Kewajaran Penyajian Informasi Keuangan	WTP	WTP	WTP	100,00	
<b>SASARAN 1</b>					<b>321,73</b>	<b>107,24</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Persen	77,26	80,74	104,50	
<b>SASARAN 2</b>					<b>104,50</b>	<b>104,50</b>
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Persen	8,49	7,98	93,99	
<b>SASARAN 3</b>					<b>93,99</b>	<b>93,99</b>
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan hidup	Persen	68,53	72	105,06	
<b>SASARAN 4</b>					<b>105,06</b>	<b>105,06</b>
Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam	Prosentase penurunan kasus yang disebabkan	Persen	0	0	100	

kehidupan bermasyarakat	masalah perbedaan agama/ keyakinan						
<b>SASARAN 5</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	
Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah	Prosentase Jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	Km	86,1	67	78		
	Luas Kabupaten Irigasi dalam kondisi baik	Ha	24.022,20	23.452	98		
<b>SASARAN 6</b>					<b>175</b>	<b>88</b>	
Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru	Jumlah Kawasan Pengembangan Ekonomi Baru	Persen	0	2	100,00		
<b>SASARAN 7</b>					<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,60	6,74	120,36		
<b>SASARAN 8</b>					<b>120,36</b>	<b>120,36</b>	
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Persen	0,25	0,42	168,00		
<b>SASARAN 9</b>					<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Persen	42,27	42,3	100,07		
	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persen	10,83	7,13	65,84		
<b>SASARAN 10</b>					<b>165,91</b>	<b>82,95</b>	
<b>TOTAL CAPAIAN KINERJA SASARAN OUT COME TAHUN 2018</b>						<b>106,98</b>	
<b>SANGAT BAIK</b>							

## **B. DESKRIPSI ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018. Pada Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari 5 (lima) tahun Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang. Pada Tahun 2018 ini, Pemerintah Kabupaten Sumedang bertekad menyelesaikan pencapaian target kinerja sasaran outcome yang belum tercapai pada tahun sebelumnya, sekaligus melakukan pencapaian kinerja yang di targetkan pada tahun 2018, serta melakukan akslerasi sesuai hasil pendampingan dengan Tim dari Kemenpan dan RB yang merekomendasikan adanya perubahan Perbup IKU yaitu dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018, yang didalamnya terdapat peubahan sasaran dan 16 sasaran dan 49 indikator menjadi 10 sasaran dan 14 indikator. Dimana pengukuran pencapaian target mengacu kepada target yang tertuang didalam Peraturan Bupati Sumedang tersebut.

Dengan tekad dan komitmen tersebut diatas, Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat menyelesaikan pekerjaan pekerjaannya sesuai dengan target yang telah direncanakan. Terdapat 10 sasaran strategis dan 14 indikator kinerja, yang menggambarkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang. Adapun deskripsi uraian capaian, perbandingan capaian kinerja terhadap tahun lalu dan kondisi akhir RPJMD, kegagalan keberhasilan, peluang dan solusi Pencapaian kinerja sasaran Outcome Pemerintah Kabupaten Sumedang yaitu sebagai berikut:

## Sasaran 1

- Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2014	SATUAN	2014		2015		2016		2017		2018		TARGET AKHIR RPJMD	PERSENTASE CAPAIAN AKHIR RPJMD
			REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9	10
Penilaian LAKIP	41,45	Interval 0-100	43,57	100,02	46,52	101,86	48,5	101,5	48,58	97	60,98	117,27	52	117,27
Penilaian LPPD	2,559	Interval 0-4	1,4	55,84	2,8	104,85	3,018	107,78	3,032	105	3314	104,46	3.000	110,47
Tingkat Kewajaran Penyajian Informasi Keuangan	WDP	Tingkat kewajaran penyajian informasi keuangan	WTP	100	WTP	100	WTP	100	WTP	100	WTP	100	WTP	100
<b>SASARAN 1 Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif</b>														

Sumber SETDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 data diolah  
BPKAD Tahun 2018 data diolah

Sasaran 1 “Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif” memiliki 3(tiga) indikator utama, yaitu Penilaian LAKIP, Penilaian LPPD, Tingkat Kewajaran Penyajian Informasi keuangan.

- Capaian kinerja indikator penilaian LAKIP pada tahun 2018 adalah 60,98 sedangkan pada tahun 2017 adalah 48,58, apabila diperbandingkan terdapat peningkatan realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar kurang lebih 20 %.

Kondisi awal tahun 2014 indikator Penilaian LAKIP adalah “41,45,” sedangkan kondisi akhir yang diinginkan pada tahun 2018 adalah “52”, realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 yang merupakan target akhir RPJMD adalah memperoleh 60,98. Dengan demikian Capaian kinerja Penilaian LAKIP sampai dengan kondisi akhir RPJMD dapat terpenuhi bahkan melebihi target direncanakan kelebihan sebesar 17,27%, (sangat baik).

- Capaian kinerja indikator penilaian LPPD pada tahun 2018 adalah 3314 sedangkan pada tahun 2017 adalah 3032, apabila diperbandingkan terdapat penurunan realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar kurang lebih 0,5 %.

Kondisi awal tahun 2014 indikator Penilaian LPPD adalah “2559,” sedangkan kondisi akhir yang diinginkan pada tahun 2018 adalah “3000”, realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 yang merupakan target akhir RPJMD adalah memperoleh 3314. Dengan demikian capaian kinerja Penilaian LPPD sampai dengan kondisi akhir RPJMD dapat terpenuhi bahkan melebihi target direncanakan kelebihanannya sebesar 10,47%, (sangat baik).

- Capaian kinerja indikator tingkat kewajaran penyajian informasi keuangan pada tahun 2018 adalah 100 sedangkan pada tahun 2017 adalah 100 apabila diperbandingkan antara tahun 2017 dan 2018 realisasi capaian kinerja cenderung tetap stabil.

Kondisi awal tahun 2014 indikator tingkat kewajaran penyajian informasi keuangan adalah “WDP,” sedangkan kondisi akhir yang diinginkan pada tahun 2018 adalah “WTP”, realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 yang merupakan target akhir RPJMD adalah memperoleh WTP. Dengan demikian capaian kinerja Tingkat kewajaran penyajian informasi keuangan sampai dengan kondisi akhir RPJMD dapat terpenuhi dengan.

Keberhasilan Sasaran Strategis 1 “**TERWUJUDNYA KELEMBAGAAN PEMERINTAH YANG EFISIEN DAN EFEKTIF**” didukung oleh Program-Program sebagai berikut :

- 1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- 2 Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan
- 3 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- 4 Program Peningkatan Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 5 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 6 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
- 7 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 9 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 11 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten
- 12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 13 Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- 14 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 15 Program Peningkatan Sarana Aparatur

- 16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 17 Program Pengembangan Data/Informasi
- 18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 19 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- 20 Program Pendidikan Kedinasan
- 21 Program Penerapan dan Penegakan Hukum
- 22 Program Penataan Sarana dan Prasarana Hukum
- 23 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 25 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
- 26 Program Pengembangan/Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan
- 27 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pelayanan Kearsipan SKPD
- 28 Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Mewujudkan Kelembagaan Pemerintah yang Efisien dan Efektif, tentunya didukung oleh upaya dan komitmen yang kuat dari seluruh komponen Pemerintahan di Kabupaten Sumedang. Terutama komitmen terkait dengan Pembinaan Manajemen Kinerja SAKIP, dengan arahan kedepan akan terwujud sebuah Manajemen Kinerja yang lebih berkualitas dan berorientasi hasil serta Efektif dan Efisien dan berkorelasi terhadap Perwujudan Kelembagaan Pemerintah yang Efisien dan Efektif.

Adapun beberapa hal yang belum maksimal dalam rangka mewujudkan kelembagaan Pemerintah yang Efisien dan Efektif, cenderung tentunya disebabkan perjalanan proses yang panjang harus dilalui secara bertahap. Dan yang terpenting adalah komitmen dari seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sumedang (dari pucuk pimpinan sampai ke bawah) adalah hal utama yang harus dikedepankan.

#### **Alternatif Solusi :**

Secara Praktis dalam rangka Mewujudkan Kelembagaan Pemerintah yang Efisien dan efektif, tentunya diperlukan upaya-upaya bagaimana mendorong Pemerintahan agar lebih Efektif dan Efisien. Beberapa solusinya adalah Implementasi Manajemen Kinerja SAKIP yang lebih berkualitas dan berorientasi hasil. Yaitu sbb:

1. Secara bertahap mulai merubah pola pikir dan pola tindak dari zona nyaman ke zona kompetitif.
2. Mendorong komitmen seluruh jajaran pimpinan dan bawahan.

## Sasaran 2 • Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 3.4  
Capaian Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2014	SATUAN	2014		2015		2016		2017		2018		TARGET AKHIR RPJMD	ERSENTASE CAPAIAN AKHIR RPJMD
			REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	74,72	Persen	73,95	98,33	77,75	102,8	77,93	101	79,17	102,91	80,74	104,5	77,26	104,5
<b>SASARAN 2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik</b>														

Sumber SETDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 data diolah

Sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ” memiliki 1 (satu) indikator utama, yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.

- Capaian kinerja indikator SKM pada tahun 2018 adalah 80,47 sedangkan pada tahun 2017 adalah 79,17, apabila diperbandingkan terdapat peningkatan realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar kurang lebih 2 %.

Kondisi awal tahun 2014 indikator SKM adalah “74,72,” sedangkan kondisi akhir yang diinginkan pada tahun 2018 adalah “77,26”, realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 yang merupakan target akhir RPJMD adalah memperoleh 80,47. Dengan demikian Capaian kinerja Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sampai dengan kondisi akhir RPJMD dapat terpenuhi bahkan melebihi target direncanakan kelebihanannya sebesar 4,50%, (sangat baik).

Keberhasilan Sasaran Strategis 2 “**MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**” didukung oleh Program-Program sebagai berikut :

- 1 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- 2 Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika
- 3 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 4 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- 5 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 6 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- 7 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- 8 Program DAK Bidang Perhubungan
- 9 Program Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
- 10 Program Pengembangan Aplikasi Sistem dan Konten Telematika
- 11 Program Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika
- 12 Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika
- 13 Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 14 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- 15 Program Pengembangan Data/Informasi
- 16 Program Kerjasama Pembangunan
- 17 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 18 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 19 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
- 20 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 21 Program Perencanaan Tata Ruang
- 22 Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa
- 23 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 24 Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 25 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- 26 Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri
- 27 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
- 28 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- 29 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- 30 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- 31 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dengan Media Masa

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, dapat dilihat dari seberapa tinggi kepuasan masyarakat ketika dilayani kebutuhan pelayanan dasarnya. Untuk melihat tinggi rendahnya Kepuasan Masyarakat ketika mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah, ditunjukkan oleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Dari tahun ke tahun Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2017 Nilai SKM : 79,17 dan pada Tahun 2018 Nilai SKM : 80,74, apabila di prosentasekan realisasi capaian Target SKM pada Tahun 2018 : 104,50 dan pada Tahun 2017 sebesar : 102% terjadi peningkatan realisasi pencapaian target sebesar kurang lebih 3 % .

Adapun beberapa hal yang belum maksimal dalam upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik cenderung tentunya dikarenakan belum seluruh Perangkat Daerah menerapkan Manajemen Mutu Pelayanan terstandar nasional (SNI-ISO). Dan yang lebih penting lagi adalah "Reformasi Birokrasi" dalam artian Perubahan *Mind Setting* dan budaya

kerja para ASN yang memang harus melayani masyarakat secara bersih dan memuaskan, karena pada hakekatnya Birokrat adalah Pelayan Masyarakat.

**Alternatif Solusi :**

Secara Praktis dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayan Publik, tentunya diperlukan dorongan yang lebih intens lagi terkait dengan Pelayanan Publik. Yaitu sbb:

1. Penerapan Manajemen Mutu terstandar nasional (SNI-ISO) bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
2. Merubah budaya kerja aparatur dari budaya ingin dilayani / feodalis menjadi budaya melayani masyarakat.

**Sasaran 3** • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan

Tabel 3.5  
Capaian Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2014	SATUAN	2014		2015		2016		2017		2018		TARGET AKHIR RPJMD	PERSEN TASE CAPAIAN AKHIR RPJMD
			REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Rata Rata Lama Sekolah	7,96	Persen	7,66	100	7,66	100	7,72	100	7,98	100	7,98	93,99	8,49	93,99
<b>SASARAN 3 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan</b>														

Sumber DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Sumedang Tahun 2018 data diolah

Sasaran 3 “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan ” memiliki 1 (satu) indikator utama, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah .

- Capaian kinerja indikator Rata-rata lama sekolah pada tahun 2018 adalah 7,98 sedangkan pada tahun 2017 adalah 7,98, apabila diperbandingkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2017 cenderung stabil.

Kondisi awal tahun 2014 indikator Rata-rata lama sekolah adalah “7,96,” sedangkan kondisi akhir yang diinginkan pada tahun 2018 adalah “8,49”, realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 yang merupakan target akhir RPJMD adalah memperoleh 7,98. Dengan demikian Capaian Rata-rata lama sekolah sampai dengan kondisi akhir RPJMD belum dapat terpenuhi secara optimal sesuai target direncanakan kekurangannya sebesar -6,01%. Namun demikian pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten sumedang dikategorikan dalam kondisi (baik).

Keberhasilan Sasaran Strategis 3 “MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN” didukung oleh Program-Program sebagai berikut :

- 1 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
- 2 Program Penyelenggaraan Pendidikan Pada BLUD
- 3 Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 4 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 5 Program Pendidikan Non Formal
- 6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 8 Program DAK Pendidikan
- 9 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 10 Program Penyelenggaraan Pendidikan Pada BLUD
- 11 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Target yang dicantumkan didalam Perjanjian Kinerja tidak sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD, adapun target yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel diatas.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, merupakan hasil kerja keras dari seluruh penggiat Pendidikan di kabupaten Sumedang. Sinergitas Antara Lembaga Pendidikan / (Sekolah), Guru, Peserta Didik dan Orang Tua Murid merupakan *culture* yang mengkristal di Kabupaten Sumedang, budaya tersebut tetap terjaga dan terpelihara secara baik hingga saat ini, terutama Budaya yang berkaitan dengan motivasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya minimal sampai dengan 9 (sembilan) tahun, atau sering kita sebut Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun. Selain hal tersebut, komitmen yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan derajat Pembangunan Manusia pada bidang Pendidikan menjadi sebuah prioritas yang utama, karena dengan meningkatnya derajat Pembangunan Manusia maka Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan akan meningkat. Setiap tahunnya capaian Indek Pembangunan Manusia di kabupaten Sumedang mengalami peningkatan secara signifikan, dimana pada Tahun 2017

IPM (MYS/ Rata-rata lama sekolah) : mencapai 7,98 , meningkat pada Tahun 2018 IPM (MYS/ Rata-rata lama sekolah) : mencapai 8,49.

Adapun beberapa hal yang belum maksimal dalam rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan cenderung disebabkan hal yang bersifat teknis operasional seperti salah satu contoh : Akses ke fasilitas pendidikan masih sulit karena tidak seimbangnya sebaran fasilitas pendidikan SD dengan penduduk usia SD dan belum seimbangnya penataan dan pemerataan guru sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Terdapat sebagian masyarakat Kabupaten Sumedang yang tidak meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih atas.

**Alternatif Solusi :**

1. Optimalisasi sebaran pendidik (Guru) di tempat terpencil/ pedesaan dan perkotaan.
2. Mendorong gerakan wajib belajar.
3. Mewadahi masyarakat yang putus sekolah, melalui sekolah kejar Paket A atau B.

**Sasaran 4** • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2014	SATUAN	2014		2015		2016		2017		2018		TARGET AKHIR RPJMD	PERSENTASE CAPAIAN AKHIR RPJMD
			REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	%		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Angka Usia Harapan Hidup	67,53	Persen	71,89	100	71,91	100	71,96	100	72	100	72	105,06	68,53	105,1
<b>SASARAN 4 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</b>														

Sumber DINAS KESEHATAN Kabupaten Sumedang Tahun 2018 data diolah

Sasaran 4 “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ” memiliki 1 (satu) indikator utama, yaitu Angka usia harapan hidup (AHH) .

- Capaian kinerja indikator AHH pada tahun 2018 adalah 72 sedangkan pada tahun 2017 adalah 72, apabila diperbandingkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2017 cenderung stabil.

Kondisi awal tahun 2014 indikator AHH adalah “67,53,” sedangkan kondisi akhir yang diinginkan pada tahun 2018 adalah “68,53”, realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 yang merupakan target akhir RPJMD adalah memperoleh “72,00”. Dengan demikian Capaian AHH sampai dengan kondisi akhir RPJMD dapat terpenuhi secara optimal bahkan melebihi target direncanakan kelebihanannya sebesar 5,01%, (sangat baik).

Keberhasilan Sasaran Strategis 4 “MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT ” didukung oleh Program-Program sebagai berikut :

- 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
- 4 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- 5 Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular
- 6 Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- 7 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- 8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
- 9 Program Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat Bidang Kesehatan
- 10 Program DAK Bidang Kesehatan
- 11 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- 12 Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD
- 13 Program Keluarga Berencana
- 14 Program pelayanan kontrasepsi
- 15 Program DAK Bidang Keluarga Berencana

Target yang dicantumkan didalam Perjanjian Kinerja tidak sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD, adapun target yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel diatas.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tercermin dari upaya-upaya Pemerintah yang berkesinambungan dalam melayani masyarakatnya pada bidang Kesehatan, lebih detailnya lagi : seberapa profesional SDM penggiat Kesehatan (tenaga-tenaga medis) bekerja melayani masyarakat, seberapa baik fasilitas kesehatan dan sarana prasarana yang ada, seberapa canggih peralatan kesehatan yang ada, seberapa baik Manajemen Pengelolaan Kesehatan Masyarakat.

Dikarenakan peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat erat kaitannya dengan Pembangunan Manusia, maka hal yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah “Pembangunan Manusia”. Yang dalam konteks ini Pemerintah Kabupaten Sumedang berupaya secara serius meningkatkan Pembangunan Manusia pada bidang kesehatan, dengan arahan bahwa: tatkala Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat maka secara otomatis Peningkatan Derajat Kesehatan akan terwujud. Setiap tahunnya capaian Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Sumedang mengalami peningkatan secara signifikan, dimana pada Tahun 2017 IPM (AHH/ Angka Harapan Hidup) mencapai : 71,96 meningkat pada tahun 2018 IPM (AHH/ Angka Harapan Hidup) mencapai : 72.

Adapun beberapa hal yang belum maksimal dalam rangka Peningkatan Derajat kesehatan Masyarakat cenderung disebabkan oleh *mind set* masyarakat yang masih variatif dalam menyikapi, Contoh: Pola Hidup Sehat, keengganan masyarakat ikut serta dalam Program BPJS Kesehatan dll. Selain *Mind Set*, kemampuan ekonomi masyarakat pun menjadi kendala yang *urgen*, dimana masih banyak masyarakat bawah yang tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan yang berkualitas.

**Alternatif Solusi :**

1. Fasilitasi pelayanan kemudahan akses kesehatan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat bawah.
2. Fasilitasi kader kesehatan berbasis lingkungan dan fasilitasi kemudahan mobilitas di daerah terpencil.

## Sasaran 5

- Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat

Tabel 3.7  
Capaian Kinerja Sasaran 5

INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2014	SATUAN	2014		2015		2016		2017		2018		TARGET AKHIR RPJMD	PERSENTASE CAPAIAN AKHIR RPJMD
			REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Prosentase Penurunan Kasus Yang disebabkan masalah perbedaan agama/ keyakinan	0	Persen	0	100	0	100	0	100	100	100	0	100	0	100
<b>SASARAN 5 Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat</b>														

Sumber KESBANGPOL Kabupaten Sumedang Tahun 2018 data diolah

Sasaran 5 “Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat” ” memiliki 1 (satu) indikator utama, yaitu “Penurunan kasus yang disebabkan masalah perbedaan agama dan keyakinan”.

- Capaian kinerja indikator “Penurunan kasus yang disebabkan masalah perbedaan agama dan keyakinan” pada tahun 2018 adalah “0” dalam artian tidak ada sengketa dan tidak ada kasus, yang berarti sama dengan 100%, sedangkan pada tahun 2017 adalah “0” dalam artian tidak ada sengketa dan tidak ada kasus, yang berarti sama dengan 100%, apabila diperbandingkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2017 cenderung stabil.

Kondisi awal tahun 2014 indikator “Penurunan kasus yang disebabkan masalah perbedaan agama dan keyakinan” adalah “0,” sedangkan kondisi akhir yang

diinginkan pada tahun 2018 adalah “0”, realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 yang merupakan target akhir RPJMD adalah memperoleh “0”. Dengan demikian Capaian “Penurunan kasus yang disebabkan masalah perbedaan agama dan keyakinan” sampai dengan kondisi akhir RPJMD dapat terpenuhi secara optimal, “0” dalam artian tidak ada sengketa dan tidak ada kasus, yang berarti sama dengan 100% (baik).

Keberhasilan Sasaran Strategis 5 “MENINGKATNYA PENERAPAN NILAI-NILAI AGAMA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT” didukung oleh Program-Program sebagai berikut :

- 1 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 3 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dimensi nilai-nilai keagamaan terejawantahkan melalui kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, kehidupan sosial kemasyarakatan dan politik, kehidupan berserikat dan berorganisasi, kehidupan berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, kehidupan berpartisipasi dalam ketertiban umum, dll. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat tercermin dalam beberapa indikator tersebut diatas yang sangat relevan sekali dengan nilai-nilai Keagamaan, dan akan bermuara pada suatu nilai Toleransi ( Toleransi antar umat beda beragama, toleransi antar umat seagama, toleransi lintas Organisasi Kemasyarakatan/ OKP/ Organisasi Politik, toleransi antar sesama warga masyarakat, dll). Alhasil di Kabupaten Sumedang sudah tidak ada lagi perselisihan ataupun konflik yang di sebabkan oleh permasalahan perbedaan agama dan keyakinan. Selain itu, *culture* yang melekat pada masyarakat Sumedang itu sendiri yang memang terkenal dengan budaya : *someah, handap asor, taliti ati-ati jeung gumati, tandang makalangan dina nyandang kahayang, linuhung ku elmu, gede wawanen dina bebeneran, jembar manah, jeung sajabana..*, yang apabila di sederhanakan mengindikasikan bahwa masyarakat sumedang “Berbudi Pekerti Luhur”. Alhasil menjadikan pola tindak masyarakat Sumedang, jauh dari perbuatan perselisihan ataupun konflik yang di sebabkan oleh permasalahan sosial dan permasalahan perbedaan agama dan keyakinan.

## Sasaran 6

### • Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah

Tabel 3.8  
Capaian Kinerja Sasaran 6

INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2014	SATUAN	2014		2015		2016		2017		2018		TARGET AKHIR RPJMD	PERSENTASE CAPAIAN AKHIR RPJMD
			REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Prosentase Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	25,5	Km	39,5	104,69	47,08	87,12	57,61	83,63	62,8	89,41	67	78	86,1	77,82
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	17.077,22	Ha	11.117,00	65	42.592	206,43	22.324,50	102,03	22.940,38	101,89	23.452,00	98	24.022,20	97,63
<b>SASARAN 6 Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah</b>														

Sumber PUPR Kabupaten Sumedang Tahun 2018 data diolah

Sasaran 6 “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah Dalam Mendorong Pengembangan Wilayah” memiliki 2 (dua) indikator utama, yaitu “Prosentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik, dan Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik”

- Capaian kinerja indikator Prosentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2018 adalah “67” sedangkan pada tahun 2017 adalah “62,8”, apabila diperbandingkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2017 cenderung pada tahun 2018 mengalami peningkatan .

Kondisi awal tahun 2014 indikator Prosentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik adalah “25,5,” sedangkan kondisi akhir yang diinginkan pada tahun 2018 adalah “86,1”, realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 yang merupakan target akhir RPJMD adalah memperoleh “67”. Dengan demikian Capaian Prosentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik sampai dengan kondisi akhir RPJMD belum dapat terpenuhi secara optimal sebesar 77,82.

Capaian kinerja indikator “Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik” pada tahun 2018 adalah “23.452,00” persentase 98%, sedangkan pada tahun 2017 adalah “22.940,38” persentase 101,89%, apabila diperbandingkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2017 cenderung pada tahun 2018 mengalami persentase penurunan kurang lebih 3%.

Kondisi awal tahun 2014 indikator “Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik” adalah “17.077,22,” sedangkan kondisi akhir yang diinginkan pada tahun 2018 adalah “24.022,20”, realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 yang merupakan target akhir RPJMD adalah memperoleh “23.452,00 Dengan demikian Capaian “Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik” sampai dengan kondisi akhir RPJMD belum dapat terpenuhi secara optimal sebesar 97,63% (baik).

Keberhasilan Sasaran Strategis 6 “MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN WILAYAH” didukung oleh Program-Program sebagai berikut :

- 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
- 3 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- 4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 5 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- 6 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- 7 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- 8 Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Lainnya
- 9 Program Pengendalian Banjir
- 10 Program Perencanaan Tata Ruang
- 11 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 12 Program DAK Bidang Jalan dan Irigasi
- 13 Program Pengembangan Data/Informasi ke PU-an
- 14 Program DAK Cipta Karya
- 15 Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 16 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- 17 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 18 Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Napidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
- 19 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kualitas Infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah, tidak terlepas dari komitmen seluruh jajaran stakeholder terkait yang ada di Pemerintahan Kabupaten Sumedang, yang senantiasa beritikad dan bertekad melakukan pembenahan wilayah Sumedang agar Sumedang maju dan berkembang secara pesat. Beberapa langkah yang dilakukan diantaranya menjaga dan melindungi infrastruktur jalan kewenangan Kabupaten agar tetap dalam kondisi baik, menjaga cakupan wilayah infrastruktur irigasi Kabupaten dalam kondisi baik. Dari Tahun ke tahun upaya peningkatan dan pembenahan Infrastruktur menunjukkan angka yang sangat baik, dimana pada setiap tahunnya jalan kewenangan Kabupaten dan irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan. Dimana pada Tahun 2017 persentase Jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik sebesar : 57,61%, meningkat sekitar 10 %, pada Tahun 2018 persentase Jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 67%. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik pada Tahun 2017 seluas: 22.324,50 Ha, meningkat sekitar 1.129 Ha lebih , Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik pada Tahun 2018 seluas: 23.452 Ha.

Adapun beberapa hal yang belum maksimal dalam rangka peningkatan infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah, cenderung dikarenakan ketersediaan Sumber Daya Anggaran yang relatif belum memadai untuk melaksanakan seluruh agenda pengembangan infrastruktur wilayah di kabupaten Sumedang dan adanya perubahan kebijakan.

**Alternatif Solusi :**

1. Daya dukung Sumber Daya Anggaran untuk menopang pengembangan infrastruktur wilayah di kabupaten Sumedang harus memadai.
2. Sistem perencanaan yang membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.

## Sasaran 7

- Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru

Tabel 3.9  
Capaian Kinerja Sasaran 7

INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2014	SATUAN	2014		2015		2016		2017		2018		KONDISI TARGET AKHIR RPJMD	PERSENTASE CAPAIAN AKHIR RPJMD
			REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Jumlah Kawasan Pengembangan Ekonomi Baru	0	Persen	0	100	0	100	2	100	0		0	100	2	100
<b>SASARAN 7 Terwujudnya Infrastruktur di Kawasan Pengembangan ekonomi baru</b>														

Sumber BAPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 data diolah

Sasaran “Terwujudnya Infrastruktur di Kawasan Pengembangan ekonomi ” ” memiliki 1 (satu) indikator utama, yaitu “Jumlah Kawasan Pengembangan Ekonomi Baru”.

- Capaian kinerja indikator “Jumlah Kawasan Pengembangan Ekonomi Baru”. Sejak tahun akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016 Indikator Jumlah Kawasan Pengembangan Ekonomi Baru sudah terpenuhi secara optimal. Dimana telah terdapat sebuah kawasan pengembangan wilayah ekonomi baru yaitu di daerah Kecamatan Darmaraja, Jatigede, Situraja dan Kecamatan Wado yang merupakan wilayah areal ekonomi baru Jatigede. Kondisi awal tahun 2014 indikator “Jumlah Kawasan Pengembangan Ekonomi Baru” adalah “0,” sedangkan kondisi akhir yang diinginkan pada tahun 2018 adalah “2” kawasan, realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 yang merupakan target akhir RPJMD adalah memperoleh “2” kawasan. Dengan demikian Capaian “Jumlah Kawasan Pengembangan Ekonomi Baru” sampai dengan kondisi akhir RPJMD dapat terpenuhi secara optimal, “2” kawasan, apabila di persentasekan sama dengan 100% (baik).

Keberhasilan Sasaran Strategis 7 “TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI BARU” Pada tahun 2018 sudah tidak didukung oleh Program

dan Kegiatan secara langsung untuk perwujudan 2 kawasan wilayah ekonomi baru tersebut, dikarenakan Pada Tahun 2016 dua kawasan wilayah ekonomi baru tersebut sudah terwujud secara optimal, meliputi Kawasan Wilayah Jatigede yang meliputi Kecamatan jatigede, darmaraja, wado, situraja dan sekitarnya.

Indikasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan Infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru. Dapat dilihat dari implementasi pembangunan infrastruktur pada kawasan pengembangan ekonomi baru, yaitu pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti : pembangunan jalan dan jembatan guna kemudahan akses mobilisasi pada kawasan ekonomi baru, pembangunan sarana prasarana air bersih, pembangunan sarana irigasi pengairan, pembangunan rumah huni/ perumahan, pembangunan pasar , dll. Lebih jauhnya, tatkala Infrastruktur pada kawasan pengembangan ekonomi baru sudah terwujud secara maksimal, maka akan memicu pergerakan investasi, menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan wirausaha baru, menciptakan sentra-sentra usaha baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jatigede sebagai kawasan pengembangan ekonomi baru, pasca dilakukan penggenangan sekitar tahun 2015 yang lalu, rupanya masih memerlukan upaya-upaya pembenahan yang lebih lagi terkait dengan Infrastruktur pada wilayah tersebut dan diperlukan tenaga dan pemikiran yang lebih pula dalam rangka mewujudkan Jatigede sebagai kawasan Potensial Pengembangan Ekonomi Baru.

Adapun beberapa hal yang belum maksimal dalam rangka mewujudkan infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru, cenderung dikarenakan ketersediaan Sumber Daya Anggaran yang relatif belum memadai untuk melaksanakan seluruh agenda pengembangan infrastruktur wilayah di wilayah tersebut.

**Alternatif Solusi :**

1. Daya dukung Sumber Daya Anggaran untuk menopang perwujudan infrastruktur di wilayah pengembangan ekonomi baru harus memadai.

## Sasaran 8 • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang

Tabel 3.10  
Capaian Kinerja Sasaran 8

INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2014	SATUAN	2014		2015		2016		2017		2018		TARGET AKHIR RPJMD	PERSENTASE CAPAIAN AKHIR RPJMD
			REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,69	Persen	4,71	100	5,25	100	5,7	100	6,23	100	6,74	120,36	5,6	120,4
<b>SASARAN 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang</b>														

Sumber BAPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 data diolah

Sasaran 8 “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang” memiliki 1 (satu) indikator utama, yaitu “Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)”

- Capaian kinerja indikator LPE pada tahun 2018 adalah “6,74” sedangkan pada tahun 2017 adalah “6,23”, apabila diperbandingkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2017 cenderung pada tahun 2018 mengalami peningkatan persentase LPE meningkat sekitar kurang lebih 0,51%.

Kondisi awal tahun 2014 indikator LPE adalah “4,69” sedangkan kondisi akhir yang diinginkan pada tahun 2018 adalah “5,6”, realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 yang merupakan target akhir RPJMD adalah memperoleh “6,74”. Dengan demikian Persentase Capaian LPE pada tahun 2018 terhadap Kondisi akhir RPJMD adalah 120,4% melebihi target sebesar 20,36 %, (Sangat Baik).

Keberhasilan Sasaran Strategis 8 “PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SUMEDANG” didukung oleh Program-Program sebagai berikut :

- 1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah dan Produktif
- 2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 3 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 4 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

- 5 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
  - 6 Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  - 7 Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan
  - 8 Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan
  - 9 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
  - 10 Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil
  - 11 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  - 12 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  - 13 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
  - 14 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial
  - 15 Program Perlindungan Tenaga kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
  - 16 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - 17 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Target yang dicantumkan didalam Perjanjian Kinerja tidak sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD, adapun target yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel diatas.

Keberhasilan Pemerintah kabupaten sumedang dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang, dapat dilihat dari laju Pertumbuhan Ekonomi yang merupakan peningkatan hasil dari kegiatan ekonomi seluruh unit ekonomi di kabupaten Sumedang, yaitu peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adapun Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sumedang Dirinci Menurut Kategori Lapangan Usaha (Persen), pada Tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi sebesar : 5,70%, meningkat sebesar kurang lebih 1,04 % dimana pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi : 6,74 %.

Adapun hal-hal yang dianggap belum maksimal dalam rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 cenderung disebabkan oleh faktor lain seperti situasi sosial politik dalam negeri, mengingat Tahun 2018 dan tahun 2019 adalah Tahun Politik sehingga sedikit mempengaruhi iklim usaha di Kabupaten Sumedang.

#### **Alternatif Solusi :**

1. Promosi Investasi dan kemudahan Investasi di kabupaten Sumedang.
2. Meningkatkan daya saing potensi ekonomi lokal.
3. Mendorong Ekonomi kreatif melalui E-Comers dan E-Bisnis di Kabupaten Sumedang.

## Sasaran 9

- Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat

Tabel 3.11  
Capaian Kinerja Sasaran 9

INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2014	SATUAN	2014		2015		2016		2017		2018		TARGET AKHIR RPJMD	PERSENTASE CAPAIAN AKHIR RPJMD
			REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Indeks Gini	0,3	Persen	0,31	106	0,328	114,28	0,349	125,92	0,37	142,31	0,42	168	0,25	168
<b>SASARAN 9 Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat</b>														

Sumber BAPPPEDA Kabupaten Sumedang Tahun 2018 data diolah

Sasaran 9 “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat” memiliki 1 (satu) indikator utama, yaitu “Indeks Gini”

- Capaian kinerja indikator Indeks Gini pada tahun 2018 adalah “0,42” sedangkan pada tahun 2017 adalah “0,37”, apabila diperbandingkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2017 cenderung pada tahun 2018 mengalami peningkatan persentase Indeks gini, meningkat sekitar 5 digit .

Kondisi awal tahun 2014 indikator Indeks Gini adalah “0,3,” sedangkan kondisi akhir yang diinginkan pada tahun 2018 adalah “0,25”, realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 yang merupakan target akhir RPJMD adalah memperoleh “0,42”. Dengan demikian Persentase Capaian Indeks Gini pada tahun 2018 melonjak naik (Sangat Meningkat Persentasenya).

Keberhasilan Sasaran Strategis 9 “MENINGKATNYA PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT” didukung oleh Program-Program sebagai berikut :

- 1 Program Peningkatan promosi dan kerjasama
- 2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- 3 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- 4 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
- 6 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
- 7 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pertanian/Perkebunan
- 8 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- 9 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- 10 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- 11 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- 12 Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian Lainnya
- 13 Program DAK Bidang Pertanian
- 14 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 15 Program Peningkatan Pengelolaan Hasil Produksi Peternakan
- 16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peternakan dan Perikanan
- 17 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 18 Program Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan
- 19 Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan
- 20 Program Peningkatan Sarana/dan Prasarana Bidang Perikanan

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat dapat dilihat dari Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang pada tahun 2018. Dimana Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sumedang Dirinci Menurut Kategori Lapangan Usaha (Persen), pada Tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi sebesar : 5,70%, meningkat sebesar kurang lebih 1,04 % dimana pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi : 6,74 %. Pertumbuhan sebesar 1,04% tersebut mengindikasikan perkembangan dan peningkatan aktifitas perekonomian kabupaten Sumedang yang ditandai dengan pergerakan roda ekonomi daerah melalui aktivitas produksi, konsumsi dan investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja , pertumbuhan wirausaha baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pendapatan masyarakat kabupaten Sumedang pada Tahun 2018. Sehingga Laju Pertumbuhan tersebut berkorelasi positif terhadap nilai Indeks Gini kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 adalah sebesar : 0,42 Poin, dengan kategori Ketimpangan Pendapatan Sedang, hal tersebut mengindikasikan bahwa pendapatan masyarakat Kabupaten Sumedang meningkat dan tarap hidup masyarakat Kabupaten Sumedang meningkat.

Adapun hal-hal yang dianggap belum maksimal dalam rangka Peningkatan Pemerataan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 cenderung disebabkan oleh faktor lain seperti situasi sosial politik dalam negeri, mengingat Tahun 2018 dan tahun 2018 adalah Tahun Politik sehingga sedikit mempengaruhi iklim Ekonomi di Kabupaten Sumedang.

### Alternatif Solusi :

1. Mendorong wirusaha baru yang lebih kreatif dan inovatif.
2. Kemudahan akses permodalan/ kredit lunak bagi wirausaha baru.
3. Mendorong Ekonomi kreatif melalui E-Comers dan E-Bisnis di Kabupaten Sumedang.

Sasaran 10

- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan

Tabel 3.12  
Capaian Kinerja Sasaran 10

INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2014	SATUAN	2014		2015		2016		2017		2018		TARGET AKHIR RPJMD	PERSENTASE CAPAIAN AKHIR RPJMD
			REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%	REALISASI	%		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	42,24	Persen	45,19	106,96	42	99,4	42,27	100,02	42,3	100,09	42,3	100,09	42,27	100,1
Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4,76	Persen	4,99	79,6	5,16	60,6	5,24	55,98	7,13	70,59	7,13	65,84	10,83	65,84
SASARAN 10 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan														

Sumber DLHK Kabupaten Sumedang Tahun 2018 data diolah

Sasaran 10 “Meningkatnya Kualitas Lingkungan hidup Berkelanjutan ” memiliki 2 (dua ) indikator utama, yaitu : “(1)Rasio luas kawasan hutan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan. (2) Prosentase ruang Terbuka Hijau (RTH)

- Capaian kinerja indikator “Rasio luas kawasan hutan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan” pada tahun 2018 adalah “42,3” sedangkan pada tahun 2017 adalah “42,3”, apabila diperbandingkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2017 cenderung stabil.

Kondisi awal tahun 2014 indikator “Rasio luas kawasan hutan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan” adalah “42,24” sedangkan kondisi akhir yang diinginkan pada tahun 2018 adalah “42,27”, realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 yang merupakan target akhir RPJMD adalah “42,3”. Dengan demikian Persentase Capaian “Rasio luas kawasan hutan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan” pada tahun 2018 terhadap Kondisi akhir RPJMD adalah 100,1% melebihi target sebesar 0,7 %, (Sangat Baik).

- Capaian kinerja indikator “Prosentase Ruang terbuka hijau (RTH)” pada tahun 2018 adalah “7,13” sedangkan pada tahun 2017 adalah “7,13”, apabila diperbandingkan capaian kinerja pada tahun 2018 dan tahun 2017 cenderung stabil.

Kondisi awal tahun 2014 indikator “RTH” adalah “4,76” sedangkan kondisi akhir yang diinginkan pada tahun 2018 adalah “10,83”, realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 yang merupakan target akhir RPJMD adalah “7,13”. Dengan demikian Persentase Capaian “RTH” pada tahun 2018 terhadap Kondisi akhir RPJMD adalah 65,84% terdapat kekurangan pencapaian target sebesar -34,16% (Cukup baik)).

Keberhasilan Sasaran Strategis 10 “MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN” didukung oleh Program-Program sebagai berikut :

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan, salah satunya ditandai dengan upaya-upaya Pemerintah dan Masyarakat yang senantiasa menjaga SDA hayati agar tetap lestari dan terjaga secara baik. Secara praktis melalui : kemitraan Pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah bencana alam melalui daerah tanggap bencana, penanaman hutan yang sudah gundul/reboisasi, menjaga ekosistem hutan baik tumbuhan maupun hewan-hewan, mengendalikan dan mencegah pencemaran air tanah dan udara melalui Amdal, mewujudkan ruang terbuka hijau, mencegah eksploitasi berlebih terhadap SDA, menjaga kebersihan lingkungan melalui Pasukan Kuning sebagai pasukan kebersihan (K-3), dll.

Adapun hal-hal yang dianggap belum maksimal dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan, sebagian cenderung diakibatkan oleh gejala-gejala hukum alam/ bencana alam yang memang sukar untuk di *estimasi* kapan kejadiannya, serta kurangnya personil penggiat Lingkungan Hidup.

**Alternatif Solusi :**

1. Menciptakan budaya ramah lingkungan di masyarakat melalui kegiatan-kegiatan berbasis lingkungan.
2. Mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, minimal dilingkungan sekitar rumah tinggal.

### 3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2018, dimensi keuangan dijadikan acuan dasar dalam rangka menilai dan mempertanggungjawabkan aspek keuangan serta menilai sejauhmana target anggaran dapat terealisasi secara akuntabel.

#### A. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

Besarnya Anggaran Pendapatan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.715.942.857.777,75 sampai dengan akhir Desember Tahun 2018 dari anggaran tersebut tercapai realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.715.942.857.777,75 , apabila dipersentasekan sebesar 113%.

Adapun target dan realisasi APBD Tahun 2018 pada sektor pendapatan sebagai berikut

Tabel 3.13  
REALISASI APBD TAHUN 2018

NO	URAIAN	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
1.	Pendapatan Asli Daerah	424.731.807.788	464.361.703.853	109,33
2.	Pendapatan Transfer	1.637.498.528.446	1.675.041.304.197	102,29
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	337.562.225.844	576.539.849.728	170,80
	JUMLAH	2.399.792.562.078	2.715.942.857.777,75	113,17

## B. Belanja Daerah

Rencana dan realisasi APBD Sumedang Tahun anggaran 2018 berdasarkan aspek belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14  
RENCANA DAN REALISASI APBD TAHUN 2018

NO.	URAIAN BELANJA	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
1.	Belanja Tidak Langsung	1.652.649.794.329,89	1.700.064.610.182,38	102,86
2.	Belanja Langsung	735.465.212.967	1.053.949.457.870	143,30
	JUMLAH	2.388.115.007.298,89	2.754.014.068.052,38	115,32

Pada dimensi belanja daerah pada tahun 2018 mengalami kenaikan 4,8 % di bandingkan dengan tahun 2017, realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp. 2.622.529.787.508,00,- sedangkan pada tahun 2018 Rp. 2.754.014.068.052,38

## C. Pembiayaan Daerah

Rencana dan realisasi APBD Sumedang Tahun 2018 berdasarkan aspek pembiayaan daerah dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.15  
PEMBIAYAAN DAERAH

NO	URAIAN PEMBIAYAAN	REALISASI (RP)	CAPAIAN %
1.	Penerimaan Pembiayaan	38.071.210.274,63	100
2.	Pengeluaran Pembiayaan	11.677.554.781,40	100
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	49.748.765.056,03	100

Adapun perbandingan realisasi APBD meliputi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan antara tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel.3.16  
PERBANDINGAN REALISASI APBD 2017 DAN 2018

TAHUN ANGGARAN	2017	2018
<b>TARGET</b>		
Pendapatan	2.728.497.402.083,07	2.399.792.562.078
Belanja	2.742.295.908.182,92	2.388.115.007.298,89
Pembiayaan	13.298.506.099,85	49.748.765.056,03
<b>REALISASI</b>		
Pendapatan	2.658.995.902.650,69	2.715.942.857.777,75
Belanja	2.622.529.787.508,00	2.754.014.068.052,38
Pembiayaan	13.298.506.009,85	49.748.765.056,03

## D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.17  
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Pencapaian Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2018	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018		PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
			REALISASI	%		
1	2		4	5	6	7
Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	Penilaian LAKIP	52	60,98	117,27		
	Penilaian LPPD	3	3,134	104,46		
	Tingkat Kewajaran Penyajian Informasi Keuangan	WTP	WTP	100		
<b>SASARAN 1</b>				<b>107,24</b>	<b>92,83</b>	<b>14,41</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	77,26	80,74	104,5		
<b>SASARAN 2</b>				<b>104,5</b>	<b>93,33</b>	<b>11,17</b>
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	8,49	7,98	93,99		
<b>SASARAN 3</b>				<b>93,99</b>	<b>88,23</b>	<b>5,76</b>
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan hidup	68,53	72	105,06		
<b>SASARAN 4</b>				<b>105,06</b>	<b>87,75</b>	<b>17,31</b>

Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat	Prosentase penurunan kasus yang disebabkan masalah perbedaan agama/ keyakinan	0	0	100		
<b>SASARAN 5</b>				<b>100</b>	<b>99,49</b>	<b>0,51</b>
Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah	Prosentase Jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	86,1	67	78		
	Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	24.022,20	23.452	98		
<b>SASARAN 6</b>				<b>88</b>	<b>97,05</b>	<b>-9,05</b>
Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru	Jumlah Kawasan Pengembangan Ekonomi Baru	0	2	100		
<b>SASARAN 7</b>				<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,6	6,74	120,36		
<b>SASARAN 8</b>				<b>120,36</b>	<b>91,41</b>	<b>28,95</b>

Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	0,25	0,42	168		
<b>SASARAN 9</b>				<b>168</b>	<b>97,14</b>	<b>70,86</b>
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	42,27	42,3	100,07		
	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10,83	7,13	65,84		
<b>SASARAN 10</b>				<b>82,95</b>	<b>90,68</b>	<b>-7,73</b>

## E. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN KINERJA

Realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan 10 sasaran strategis kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18  
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )	REALISASI ANGGARAN (Dalam Rp.)	PERSENTAS E (%)
1	2	2	3	4	5
1.	<b>Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif</b>	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	7.075.145.920	6.720.692.440	94,99
		Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan	7.771.126.450	7.254.471.793	93,35
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	438.615.600	323.605.368	73,78
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3.769.222.098	3.609.247.350	95,76
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	298.145.600	297.145.600	99,66
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	15.000.000	15.000.000	100
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.024.488.250	8.424.196.982	93,35
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	710.817.600	668.408.900	94,03
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	101.150.000	101.150.000	100,00
		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	35.846.000	24.346.000	67,92

		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	171.850.000	167.806.720	97,65
		Program Peningkatan Sarana Aparatur	358.042.599	339.654.976	94,86
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	230.530.000	219.375.000	95,16
		Program Pengembangan Data/Informasi	320.000.000	314.762.500	98,36
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.053.920.900	1.643.708.460	80,03
		Program Pendidikan Kedinasan	1.758.233.000	1.736.991.418	98,79
		Program Penerapan dan Penegakan Hukum	999.953.500	828.192.900	82,82
		Program Penataan Sarana dan Prasarana Hukum	210.123.500	206.707.228	98,37
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	18.002.261.200	16.821.666.075	93,44
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11.318.971.351	10.999.087.693	97,17
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	105.000.000	104.934.000	99,94
		Program Pengembangan/Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan	280.000.000	259.995.250	92,86
			<b>65.048.443.568</b>	<b>61.081.146.653</b>	<b>92,83</b>
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.165.238.800	1.120.189.828	96,13
		Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	396.545.000	388.817.000	98,05

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100.000.000	100.000.000	100,00
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	240.262.000	236.273.000	98,34
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	5.516.761.112	5.421.999.500	98,28
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	520.000.000	513.325.300	98,72
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	565.800.000	543.414.950	96,04
Program Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	917.963.000	809.968.911	88,24
Program Pengembangan Aplikasi Sistem dan Konten Telematika	504.992.000	461.373.512	91,36
Program Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika	40.000.000	39.335.000	98,34
Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	396.545.000	388.817.000	98,05
Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.120.000.000	994.325.794	88,78
Program Kerjasama Pembangunan	100.000.000	96.280.000	96,28
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.364.568.000	4.237.816.449	97,10
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	190.000.000	182.391.300	96,00
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1.047.000.000	1.008.131.350	96,29
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	16.887.000.000	16.613.316.900	98,38

		Program Perencanaan Tata Ruang	36.299.000.000	3.470.689.550	9,56
		Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa	240.000.000	235.842.350	98,27
		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.305.000.000	1.257.376.500	96,35
		Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri	668.000.000	658.091.100	98,52
		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	100.000.000	99.900.000	99,90
		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	147.000.000	146.999.500	100,00
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	883.050.000	870.538.750	98,58
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1.021.422.000	998.815.145	97,79
			<b>74.736.146.912</b>	<b>40.894.028.689</b>	<b>93,33</b>
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan</b>	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	975.000.000	954.449.662	97,89
		Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	35000000	35.000.000	100,00
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	350.000.000	348.245.500	99,50
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	168.947.000.000	167.471.842.446	99,13
		Program Pendidikan Non Formal	325.000.000	321.808.000	99,02
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	670.000.000	596.603.400	89,05

		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	118.898.166.000	118.139.060.513	99,36
		Program DAK Pendidikan	25.843.727.000	25.598.985.870	99,05
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	505.500.000	502.227.450	99,35
			<b>316.549.393.000</b>	<b>313.968.222.841</b>	<b>88,23</b>
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.775.000.000	5.744.609.449	99,47
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	66.804.339.594	54.009.007.176	80,85
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	400.000.000	368.969.500	92,24
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.550.000.000	1.288.068.481	83,10
		Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	1.319.689.816	1.110.642.213	84,16
		Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	12.458.321.451	11.710.348.750	94,00
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	873.000.000	857.225.200	98,19
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1.750.000.000	583.440.000	33,34

		Program DAK Bidang Kesehatan	35.706.638.84 2	33.628.777.351	94,18
		Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	201.677.248.0 31	171.276.662.55 7	84,93
		Program Keluarga Berencana	379.972.000	379.961.950	100,00
		Program pelayanan kontrasepsi	250.000.000	249.365.000	99,75
		Program DAK Bidang Keluarga Berencana	7.180.558.000	6.930.416.300	96,52
			<b>336.124.767.7 34</b>	<b>288.137.493.92 7</b>	<b>87,75</b>
5.	<b>Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat</b>	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	618882750	615.705.650	99,49
			<b>618.882.750</b>	<b>615.705.650</b>	<b>99,49</b>
6.	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah</b>	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	40.724.302.00 0	38.926.868.750	95,59
		Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	277.450.000	272.087.000	98,07
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	4.154.090.000	4.125.067.038	99,30
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9.486.305.000	9.247.568.000	97,48
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	37.908.000.00 0	36.245.408.800	95,61
		Program Pengendalian Banjir	2.730.000.000	2.420.594.150	88,67

		Program Perencanaan Tata Ruang	3.629.000.000	3.470.689.550	95,64
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	420.000.000	410.480.975	97,73
		Program DAK Bidang Jalan dan Irigasi	24.436.375.000	24.141.565.117	98,79
		Program Lingkungan Sehat Perumahan	13.288.705.888	13.118.119.800	98,72
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	901.600.000	893.202.500	99,07
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	400.000.000	399.615.000	99,90
			<b>138.355.827.888</b>	<b>133.671.266.680</b>	<b>97,05</b>
<b>7.</b>	<b>Terwujudnya Infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru</b>				
<b>8.</b>	<b>Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang</b>	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	700.000.000	696.700.000	99,53
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	890.600.000	772.140.100	86,70
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	840.460.000	791.356.436	94,16
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	2.592.258.404	2.574.942.404	99,33
		Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	96.000.000	95.040.000	99,00
		Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan	823.700.000	810.067.300	98,34

		Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan	259.688.000	258.664.000	99,61
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil	687.026.300	649.363.350	94,52
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	700.000.000	696.700.000	99,53
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	4.561.869.300	1.645.800.300	36,08
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	3.133.440.054	3.093.240.600	98,72
			<b>15.285.042.058</b>	<b>12.084.014.490</b>	<b>91,41</b>
<b>9</b>	<b>Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat</b>	Program Peningkatan promosi dan kerjasama	106.000.000	102.641.500	96,83
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	687.026.300	649.363.350	94,52
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2.592.258.404	2.574.942.404	99,33
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1.114.350.000	1.108.811.343	99,50
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Pertanian/Perkebunan	144.000.000	137.263.000	95,32
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	5.643.157.095	5.358.693.098	94,96
		Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	100.000.000	98.767.000	98,77
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3.557.510.000	3.360.640.420	94,47

		Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian Lainnya	38.294.534.600	37.855.778.760	98,85
		Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	75.000.000	72.394.000	96,53
		Program Peningkatan Sarana/dan Prasarana Bidang Peternakan	150.000.000	149.190.000	99,46
			<b>52.463.836.399</b>	<b>51.468.484.875</b>	<b>97,14</b>
<b>10.</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan</b>	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4.119.434.385	3.977.889.289	96,56
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	200.000.000	192.531.700	96,27
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	455.000.000	351.558.050	77,27
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.487.500.000	962.839.450	64,73
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	383.320.000	382.658.500	99,83
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	19.393.224.940	13.517.748.440	69,70
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	5.516.761.112	5.421.999.500	98,28
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	16.887.000.000	16.613.316.900	98,38
		Program DAK Bidang Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Permukiman	2.031.498.000	1.282.945.700	63,15
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Peggunaann dan Pemanfaatan Tanah	13.288.705.888	13.718.119.800	103,23
		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	80.000.000	80.000.000	100,00

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4.054.024.900	4.013.931.850	99,01
Program Perlindungan Sosial bagi PMKS yang termasuk dalam kriteria korban bencana	226.238.000	200.655.900	88,69
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	901.600.000	893.202.500	99,07
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	400.000.000	399.615.000	99,90
Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	1.487.500.000	962.839.450	64,73
Program penataan administrasi kependudukan	1.120.000.000	994.325.794	88,78
Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan	259.688.888	258.664.000	99,61
Program kesehatan reproduksi remaja	50.000.000	49.750.000	99,50
Program kerjasama informasi dengan media masa	240.000.000	235.842.350	98,27
Program pengembangan data statistik daerah	595.090.000	587.118.000	98,66
Program peningkatan dan pengembangan ekspor	687.026.300	649.363.350	94,52
Program pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional	650.000.000	647.891.900	99,68
Program penimhkatan sarana dan prasarana bidang peternakan	150.000.000	149.190.000	99,46
Program pengelolaan kekayaan budaya	1.305.000.000	1.257.376.500	96,35

	Program pengembangan pemasaran pariwisata	1.851.719.000	1.807.935.100	97,64
	Program DAK bidang kepariwisataan	1.881.490.000	663.290.500	35,25
	Program pengembangan data dan informasi	818.150.000	800.491.850	97,84
	Program perencanaan pembangunan daerah	436.456.800.000	423.781.644.900	97,10
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	4.054.024.900	4.013.931.850	99,01
		<b>521.030.796.313</b>	<b>498.868.668.123</b>	<b>90,68</b>

### 3.3 PENGHARGAAN TAHUN 2018

Berikut ini adalah data Penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Sumedang dari Pada Tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.19  
Penghargaan Tahun 2018

NO	Instansi	Nama Prestasi/ Penghargaan	Bidang Prestasi	Peringkat Prestasi	Kabupaten	WIL	Provinsi	Nasional	Internasional	Lembaga Yang Memberi Penghargaan	Ket
1	Pemerintah Kabupaten Sumedang	SAKIP AWARDS	AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	B				√		Kemenpan RB RI	
2	DESA SUKAJAYA Kabupaten Sumedang	ANUBHAWA SASANA DESA	PRESTASI DESA SADAR HUKUM	Desa sadar hukum				√		Menhumkam RI	
3	Pemerintah Kabupaten Sumedang	JDIH (jaringan dokumentasi informasi hukum)	PRESTASI JDIH (jaringan dokumentasi informasi hukum)	Terbaik			√			Gubernur Jawa Barat	

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka untuk itu dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang ini disusun untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja program maupun sasaran sebagai realisasi pencapaian target-target yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2014-2018 yang juga telah dituangkan dalam kontrak kerja berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2018 untuk diwujudkan pada tahun 2018. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Sumedang setelah melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya pada tahun 2018.

Ringkasan Hasil pengukuran atas 10 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja Utama tersebut secara umum telah memenuhi target dengan capaian sebagai berikut :

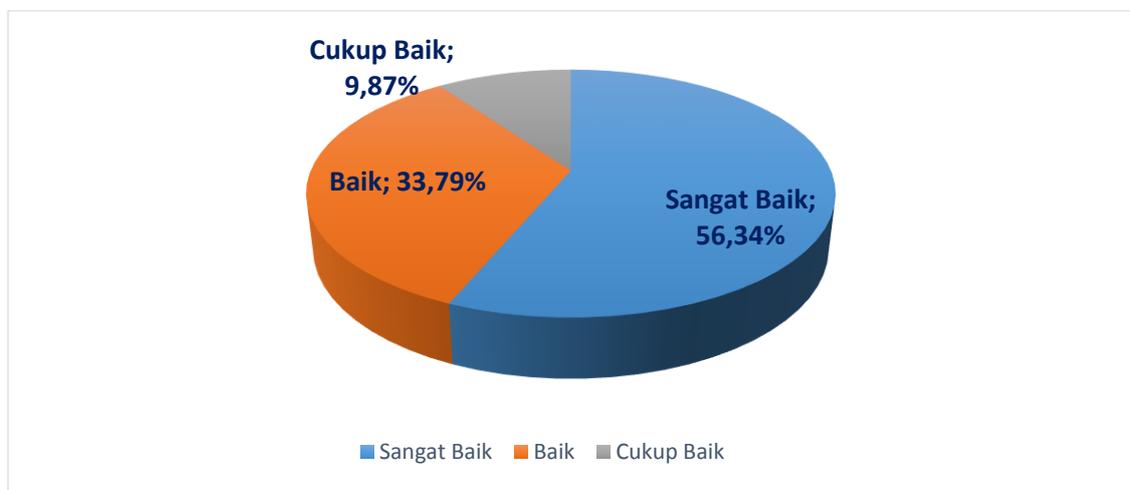
1. Sasaran Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif : 107,24% (SANGAT BAIK)
2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik : 104,50 (SANGAT BAIK).
3. Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan : 93,99 (BAIK).
4. Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat : 105,06 (SANGAT BAIK).
5. Sasaran Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat : 100 (BAIK).
6. Sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah : 88 (BAIK).

7. Sasaran Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru : 100 (BAIK).
8. Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang : 120,36 (SANGATBAIK).
9. Sasaran Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat : 168,00 (SANGAT BAIK).
10. Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan : 82,95 (BAIK).

Adapun diagram hasil pengukuran atas 10 Sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja Utama tersebut secara umum telah memenuhi target dengan capaian sebagai berikut

**56,34 (7) indikator melebihi target dengan kategori SANGAT BAIK;**  
**33,79 (5) indikator sesuai target dengan kategori BAIK,**  
**9,87 ( 2) indikator sesuai target dengan kategori CUKUP BAIK,**

Diagram 4.1  
Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018  
PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018



Dari ringkasan data diatas, terdapat 2 Indikator dengan kategori “CUKUP Baik”, yaitu Indikator :

1. Persentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi Baik
2. Rasio Ruang Terbuka Hijau

Pencapaian Realisasi untuk Indikator : “Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Baik” dan “Rasio Ruang Terbuka Hijau”, belum dapat mencapai target sesuai dengan yang diharapkan. Adapun kegagalan tersebut diakibatkan oleh:

1. Persentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi Baik
  - Anggaran kurang memadai
  - Curah hujan tinggi sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2018, sehingga mempengaruhi kondisi jalan dalam kondisi baik.
2. Rasio Ruang Terbuka Hijau
  - Anggaran kurang memadai
  - Kurangnya penggunaan lahan untuk dijadikan RTH

Langkah Perbaikan :

1. Persentase jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi Baik
  - Memperkuat proporsi Anggaran untuk optimalisasi Jalan kewenangan kabupaten dalam Kondisi baik.
2. Rasio Ruang Terbuka Hijau
  - Memperkuat proporsi Anggaran untuk optimalisasi Ruang terbuka Hijau, melalui pembuatan taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota dan hutan lindung.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja tahun ke 5 (lima) yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumedang dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Sumedang Perubahan Tahun 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Beberapa indikator kinerja belum terlaksana secara optimal yang dikarenakan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan, hal ini menjadi catatan penting terhadap upaya perbaikan di masa yang akan datang. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten

Sumedang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumedang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini dapat memenuhi permintaan pertanggungjawaban kinerja sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) yang pada tingkat Pemerintah Daerah disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada masa mendatang.

PERNYATAAN PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG



PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.H. EKA SETIAWAN, Dipl.SE.MM

Jabatan : BUPATI SUMEDANG

Pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sumedang, 01 Pebruari 2018

BUPATI SUMEDANG,

**Ir.H. EKA SETIAWAN, Dipl.SE.MM**

**PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**

Kabupaten : Sumedang  
Tahun Anggaran : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif	Penilaian LAKIP	Peringkat	52,00	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4.856.380.920		
					Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan	6.048.156.450		
		Penilaian LPPD	Peringkat	3,00	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	438.615.800		
					Program Peningkatan Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
		Tingkat Kewajaran	Opini BPK	WTP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3.769.222.098		
					Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	205.193.600		
					Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			
							Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.816.500.000
							Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.954.014.500
							Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.675.388.650
							Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten	686.270.000
							Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	101.150.000
							Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	35.846.000
		Program Peningkatan Sarana Aparatur	790.862.200					
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Program Pengembangan Data/Informasi	826.950.000
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23.325.000
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.909.920.900
					Program Pendidikan Kedinasan	1.014.480.000
					Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan)	
					Program Penerapan dan Penegakan Hukum	1.149.953.500
					Program Penataan Sarana dan Prasarana Hukum	210.123.500
					Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	105.000.000
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	15.993.525.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	205.790.500
					Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	
					Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan	280.000.000
					Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pelayanan Kearsipan SKPD	173.623.000
					Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Poin	77,26	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	715.238.800
					Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	
					Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	240.262.000
					Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	591.200.000
					Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	220.000.000
					Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	230.000.000
					Program DAK Bidang Perhubungan	401.220.000
					Program Pembinaan Telematika Daerah	
					Program Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	817.963.000
					Program Pengembangan Aplikasi Sistem dan Konten Telematika	704.992.000
					Program Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika	70.000.000
					Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	95.000.000
					Program Penataan Administrasi Kependudukan	
					Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	250.000.000
					Program Perencanaan Pembangunan	
					Program Pengembangan Data/Informasi	120.421.700
					Program Kerjasama Pembangunan	100.000.000
					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.227.000.000
					Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	275.000.000
					Program Perencanaan Sosial dan Budaya	550.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	
					Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	88.000.000
					Program Penataan Perkotaan dan Pedesaan	2.810.000.000
					Program Perencanaan Tata Ruang	3.120.000.000
					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2.475.000.000
					Program Perencanaan Tata Ruang	90.000.000
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.721.112.000
					Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa	1.042.300.000
					Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa	140.000.000
					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
					Program Pendidikan Politik Masyarakat	
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	825.000.000
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	
					Program Peningkatan Aktifitas Perempuan dalam Pembangunan (P2WKKS)	188.440.000
					Program Penguatan Kelembagaan Gender dan Anak	350.000.000
					Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri	668.000.000
					Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	100.000.000
					Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	
					Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	147.000.000
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	283.050.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	796.422.000
					Program Pengembangan Komunikasi Informasi dengan Media Masa	
					Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	600.000.000
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	200.000.000
					Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2.505.000.000
					Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.271.036.000
					Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	15.000.000
3.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	84,42	Program Penyelenggaraan Pendidikan Pada BLUD	4.370.898.160
					Program Peningkatan Operasional Tingkat Satuan Pendidikan	
					Program Pendidikan Anak Usia Dini	350.000.000
					Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	7.092.000.000
					Program Pendidikan Menengah	6.390.200.000
					Program Pendidikan Non Formal	325.000.000
					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	670.000.000
					Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.282.166.000
					Program DAK Pendidikan	7.876.278.650
					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	430.500.000
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	Tahun	72,55	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.100.000.000
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	50.008.387.630

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	250.000.000
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat	507.500.000
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	700.000.000
					Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	1.169.689.816
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.519.122.000
					Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	20.012.992.810
					Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	8.835.640.461
					Program Kesehatan Remaja	350.000.000
					Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	100.000.000
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dan Remaja	
					Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	373.000.000
					Program Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Barat Bidang Kesehatan	13.909.995.595
					Program DAK Bidang Kesehatan	34.921.610.000
					Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	14.309.339.000
					Program DAK Bidang Kesehatan	4.141.185.000
					Program Pelayanan Kesehatan Pada BLUD	144.397.387.037
					Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	178.000.019.418
					Program Keluarga Berencana	379.972.000
					Program pelayanan kontrasepsi	175.000.000
					Program DAK Bidang Keluarga Berencana	7.180.558.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
5.	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat	Prosentase penurunan kasus yang disebabkan masalah perbedaan agama/keyakinan	Prosentase	0	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
6.	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah	Prosentase Jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	86,1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	30.007.500.000
					Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	277.450.000
					Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2.050.000.000
					Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8.246.725.000
					DAK Bidang Infrastruktur Jalan	1.029.090.000
					Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	3.919.043.750
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	31.288.169.400			
		Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	24.022,2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	23.356.000.000
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Lainnya	3.717.404.200
					Program DAK PU Irigasi	2.278.020.000
					Program Pengembangan Data/Informasi ke PU-an	150.000.000
					Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	
					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang ke PU-an	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Program DAK Cipta Karya	3.830.870.000
					Program Lingkungan Sehat Perumahan	10.896.268.888
					Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	651.600.000
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	50.000.000
					Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (Eks Napidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	100.000.000
					Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	200.000.000
					Program Pembinaan dan Latihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	108.000.000
7.	Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru	Jumlah Kawasan Pengembangan Ekonomi	Kawasan	0		
8.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah dan Produktif	
					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	240.000.000
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja	635.600.000
					Program Pengembangan Kemitraan	
					Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	350.000.000
					Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	220.000.000
					Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	375.000.000
					Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat perdesaan	823.700.000
					Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	265.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Perdesaan	
					Program DAK Perdagangan Pasar	2.043.196.000
					Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri	3.861.869.300
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil	300.000.000
					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	150.000.000
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	200.000.000
					Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.907.690.393
					Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial	450.000.000
					Program Perlindungan Tenaga kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	190.000.000
					Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	200.000.000
9.	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	Poin	0.25	Program Peningkatan promosi dan kerjasama	525.000.000
					Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	390.000.000
					Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan	320.000.000
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	446.450.000
					Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
					Program Peningkatan Ketahanan	270.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Pangan (Pertanian/Perkebunan)	
					Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	75.000.000
					Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	
					Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	3.224.676.7000
					Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	437.760.000
					Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	100.000.000
					Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3.055.010.000
					Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	64.000.000
					Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian lainnya	13.154.359.495
					Program DAK Bidang Pertanian	6.791.996.000
					Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	75.000.000
					Program Pengembangan Data / Informasi Peternakan / Perikanan	
					Program Peningkatan Pengelolaan Hasil Produksi Peternakan	100.000.000
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peternakan dan Perikanan	75.000.000
					Program Pengembangan Budidaya Perikanan	850.000.000
					Program Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan	100.000.000
					Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	275.000.000
					Program Peningkatan Sarana/Prasarana Bidang Perikanan	200.000.000
					Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.477.500.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
					Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian lainnya	629.750.000
10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Persen	42,27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.242.649.000
					Program Pengembangan Agribisnis	
					Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	360.000.000
					Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	2.116.994.100
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	670.000.000
					Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	453.000.000
					Program Peningkatan Pengendalian Polusi	150.000.000
					Program DAK Energi Pedesaan	
		Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persen	10,83	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	705.000.000
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	150.000.000
					Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.333.320.000
					Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	
					Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.518.994.720
					Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.375.000.000
					Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	
					Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	4.005.561.112
					Program Pengendalian Air Tanah	568.610.600
					Program Pengembangan Nilai Budaya	431.719.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	URAIAN PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN ( Dalam Rp )
1	2	3	4	5	6	7
				20,00	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
					Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	710.000.000
				100,00	Program Pengembangan Nilai Budaya	431.719.000
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	100.000.000
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	665.000.000

BUPATI SUMEDANG,

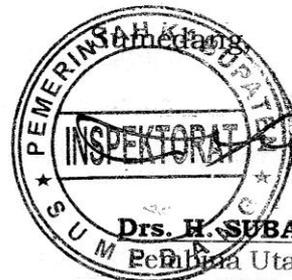
**Ir.H. EKA SETIAWAN, Dipl.SE.MM**

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Maret 2019

**Drs. H. SUBAGIO, M.Si**  
Pejabat Utama Muda

NIP. 19610215 198603 1 008



**SAKIP AWARDS Tahun 2018**



**PRESTASI JDIH (jaringan dokumentasi informasi hukum)**



**PRESTASI DESA SADAR HUKUM**



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN  
KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati dapat memperluas praktek penyusunan perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal;
- b. bahwa sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan setiap perangkat daerah dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja perlu ditetapkan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

## Pasal 2

Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten menyusun perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja setiap tahun.

## Pasal 3

Reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh inspektorat

## Pasal 4

Ketentuan mengenai penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Juli 2018

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 42 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN  
KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA  
REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PERJANJIAN KINERJA

A. Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

C. Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten

1) Pimpinan Tertinggi (Bupati)

Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun Perjanjian kinerja tingkat Kabupaten ditandatangani oleh Bupati.

## 2) Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten

Perjanjian kinerja ditingkat Perangkat Daerah Kabupaten disusun oleh Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten kemudian ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten/unit kerja.

## 2. Waktu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

## 3. Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

- a. Untuk tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten dan indikator kinerja lain yang relevan.
- b. Untuk tingkat Perangkat Daerah Kabupaten/ Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan dampak pada bidangnya dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.
- c. Untuk tingkat Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan minimal *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon III dan indikator kinerja lain yang relevan.
- d. Untuk tingkat Eselon IV sasaran yang digunakan menggambarkan minimal *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon IV dan indikator kinerja lain yang relevan.

## D. Format Perjanjian Kinerja

Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut.

### 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas:

- a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
- b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.  
Contoh Formulir Pernyataan Perjanjian Kinerja:
  - 1) Kabupaten terdapat pada anak lampiran I/1-a.
  - 2) Perangkat Daerah terdapat pada anak lampiran I/1-b.

### 2. Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya, sebagaimana ilustrasi pada anak lampiran berikut:

Contoh Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja:

- 1) Kabupaten terdapat pada anak lampiran I/1-c.
- 2) Perangkat Daerah (Eselon II) terdapat pada anak lampiran I/1-d.
- 3) Unit Kerja Perangkat Daerah (Eselon III) terdapat pada anak lampiran I/1-e
- 4) Unit Kerja Perangkat Daerah (Eselon IV) terdapat pada anak lampiran I/1-f

#### E. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- 1) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- 2) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- 3) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**CONTOH FORMULIR**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

-Logo Lembaga-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN ....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

....., ..... 20...  
Bupati Sumedang,

.....

**CONTOH FORMULIR**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH  
(NAMA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN SUMEDANG

-Logo Lembaga-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(Bupati)

.....,.....20XX  
Pihak Pertama,

(Kepala Perangkat Daerah)

Catatan : untuk Jabatan dibawah kepala Perangkat Daerah Kabupaten, format pernyataan perjanjian kinerja menyesuaikan.

**CONTOH FORMULIR**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20...  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program  
Anggaran

1..... Rp

.....

2..... Rp

.....

....., .....20XX  
Bupati Sumedang,

( )

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Pemda yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemda;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemerintah Daerah Kabupaten yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.





**CONTOH FORMULIR**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT KERJA PERANGKAT  
DAERAH (ESELON IV)PERJANJIAN KINERJA TAHUN  
20... UNIT KERJA....

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Kegiatan

Anggaran

1..... Rp .....

2..... Rp .....

.....20XX

Pimpinan Unit Kerja Perangkat  
Daerah (Eselon III)

.....,

Pimpinan Unit Kerja Perangkat  
Daerah (Eselon IV)

( )

( )

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan unit kerja atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan setelah dilaksanakannya kegiatan tersebut;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari unit kerja yang relevan dengan sasaran kegiatan atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh unit kerja pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan unit kerja pada tahun tersebut;

- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan oleh unit kerja untuk mencapai sasaran program yang dimaksud.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 42 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN  
KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA  
REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

PETUNJUK TEKNIS  
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan pelaporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Format laporan kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

(Contoh Format laporan kinerja terdapat pada anak lampiran II/1a)

D. Penyampaian Laporan Kinerja

Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Sumedang, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati Sumedang menyusun laporan kinerja tahunan

Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur Jawa Barat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bupati dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

#### E. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja

yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran

dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

#### F. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

#### G. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada Perangkat Daerah (setingkat Eselon II) adalah indikator hasil (*outcome*) yang setingkat lebih tinggi unit kerja dibawahnya. Indikator

kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon III dan setingkat Eselon IV) paling sedikit indikator keluaran (*output*).

#### H. Pengumpulan Data Kinerja

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

**CONTOH FORMAT**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran: Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 42 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN  
KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA  
CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

PEDOMAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA

A. Pengertian Reviu atas laporan kinerja

Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

B. Tujuan

Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

1. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka unit pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang.

C. Tata Cara Reviu

1. Pihak yang melaksanakan reviu

Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu.

2. Waktu pelaksanaan reviu

Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri PAN dan RB.

3. Ruang lingkup pelaksanaan reviu

a. Metode pengumpulan data/informasi

Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.

b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas

Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan perencanaan strategis unit dibawahnya (Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang), terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

c. Penyusunan kertas kerja reviu

Kertas kerja reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja;
- 2) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;
- 3) Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan;
- 4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/catatan pereviu.

d. Setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja.

e. Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang saja.

4. Pelaporan reviu

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi pereviu untuk membuat pernyataan telah direviu, yang antara lain menyatakan bahwa:

- a. Reviu telah dilakukan atas laporan kinerja untuk tahun yang bersangkutan.
- b. Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan kinerja.
- c. Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen .
- d. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah.
- e. Simpulan reviu yaitu apakah laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah.
- f. Paragraph penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi atas penyajian laporan kinerja yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unit pengelola kerja.

Contoh Formulir Pernyataan Telah Direviu terdapat pada anak lampiran III/1-a, dan contoh Formulir *Checklist* Reviu terdapat pada anak lampiran III/1

**CONTOH PERNYATAAN FORMULIR TELAH DIREVIU**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN.....

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk tahun anggaran..... sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

(Sumedang), (tanggal, bulan, tahun)  
Inspektur .....

(Nama Penanda Tangan)  
NIP

**CONTOH FORMULIR CHECKLIST REVIU**

NO.	PERNYATAAN		CHEK LIST
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja (Lkj) telah menampilkan data penting IP</li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja</li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai</li> <li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li> </ol>	
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai</li> <li>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj</li> <li>4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja</li> <li>5. Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya</li> <li>6. Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait</li> <li>7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya</li> </ol>	
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja</li> <li>2. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis</li> <li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelesan yang memadai</li> <li>4. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja</li> <li>5. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam Indikator Kinerja Utama</li> <li>6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat</li> </ol>	

		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran 9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai 10. IKU dan IK telah SMART	
--	--	--	--

Pj. BUPATI SUMEDANG,

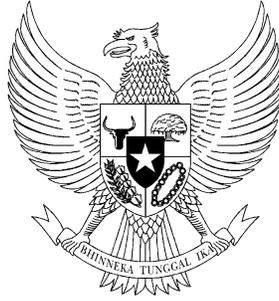
ttd

SUMARWAN HADISOEMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2015 TENTANG  
PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, Bupati telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018;
- b. bahwa sehubungan indikator kinerja utama pemerintah daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan indikator kinerja utama SKPD yang ditetapkan oleh Bupati maka Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
  12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 87) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018.
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Utama SKPD mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2018.
- (3) Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
  - b. Indikator Kinerja Utama SKPD paling kurang memuat indikator hasil (outcome) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas serta indikator keluaran (output) untuk unit kerja dibawahnya;
- (4) Penetapan Indikator Kinerja Utama selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga

mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

- a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 84

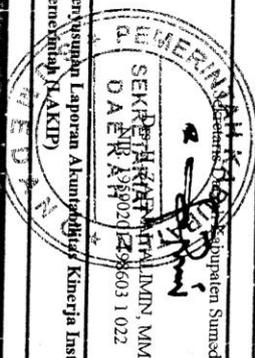
Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 00



 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG SEKRETARIAT DAERAH		Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh		10.13.16-34
<b>Bagian Organisasi</b> Sub Bagian Akuntabilitas Dan Pelayanan Aparatur		Nama SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		 SEKRETARIS KABUPATEN SUMEDANG DAERAH 13990212986031022
<b>Dasar Hukum</b>				
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.				
<b>Keterkaitan SOP</b> SOP Penyusunan LAKIP				
<b>Kualifikasi Pelaksana</b>				
1. Memahami tentang penyusunan LAKIP 2. Menguasai tentang tata cara penyusunan LAKIP 3. Memahami Pedoman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4. Memahami Pengoperasian Komputer 5. Memahami Dampak Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Aspek Lainnya. Seperti : (1) Kepercayaan Publik/ Kepuasan Publik (2) Kinerja Lembaga/ Organisasi dan Kinerja Individu Pegawai.				
<b>Peralatan/ Perlengkapan</b>				
1. Komputer 2. Lemari Arsip 3. Formulir pengisian data penyusunan LAKIP 4. ATK				
<b>Penerbitan &amp; Penilaian</b>				
<b>Peringatan</b> Jika SOP penyusunan LAKIP tidak tepat waktu maka akan berdampak kepada nilai LAKIP				

Kegiatan	Kategori Organisasi	Meningkatkan Kemampuan dan Penguasaan Aparatur	Penguasaan Data	Tipe Perencanaan (BERTANDA, BERTANDA Inspektoral)	Penyusunan LAKIP SKPD	Asisten	Sekda	Bupati	Kedengkap	Waktu	Output	Keenaan
1. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Aparatur menyusun dan pelaksana teknis kegiatan beserta jadwal kegiatan penyusunan LAKIP Kabupaten Sumedang									Jadwal Kegiatan, Benda yang akan diadukan tim	1650 Menit	SK tim penyusunan LAKIP	
2. Pengelola Data membuat surat undangan untuk rapat pendahuluan Tim penyusunan LAKIP Kabupaten Sumedang									SK tim penyusunan LAKIP	180 Menit	surat undangan rapat pendahuluan	
3. Tim melaksanakan rapat persiapan Penyusunan LAKIP Kabupaten Sumedang									surat undangan rapat pendahuluan	1650 Menit	Hasil rapat penyusunan LAKIP	Hasil rapat penyusunan LAKIP
4. Kasubag menindaklanjuti hasil rapat Tim dengan memerintahkan Pengelola Data untuk membuat surat permintaan data kepada penyusun LAKIP pada tiap SKPD se Kabupaten Sumedang									Hasil rapat penyusunan LAKIP	1650 Menit	Hasil rapat penyusunan LAKIP, formulir pengkukuran kinerja	
5. Pengelola Data mengirimkan surat permintaan data ke semua penyusun LAKIP tiap SKPD, baik secara periodik maupun tahunan, dengan menggunakan Formulir pengkukuran kinerja.									Hasil rapat penyusunan LAKIP, formulir pengkukuran kinerja	1650 Menit	Formulir pengkukuran kinerja	
6. Pengelola LAKIP SKPD mengirimkan data LAKIP									Formulir pengkukuran kinerja	1650 Menit	data LAKIP	
7. Pengelola Data menerima dan mengumpulkan data LAKIP SKPD, mempelajari formulir lanudngan yang termuat dalam LAKIP SKPD, kesesuaiannya terhadap RI/MD, RKPD, Perjanjian Kinerja. Apabila kurang sesuai maka dikembalikan ke SKPD untuk dilakukan penyempurnaan.									data LAKIP	1650 Menit	data LAKIP	
8. Pengelola data melakukan perekapan data LAKIP SKPD sebagai langkah awal untuk penyusunan LAKIP Kabupaten Sumedang, mencatat perkembangan dan permasalahan data untuk penyusunan rancangan LAKIP Kabupaten Sumedang, berkoordinasi dengan Tim Penyusunan LAKIP Kabupaten secara periodik untuk mengetahui langkah pemecahannya.									data LAKIP	6600 Menit	data LAKIP	
9. Pengelola Data mengolah dan menyajikan data awal untuk penyusunan rancangan LAKIP Kabupaten Sumedang serta menyampalukannya ke pada Kasubag Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Aparatur untuk ditindaklanjuti.									data LAKIP	6600 Menit	Laporan LAKIP	
10. Kasubag Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Aparatur melaksanakan koordinasi dan koordinasi ke Kemangan, Kemandagri, Provisri, SKPD terkait dan Kabupaten/Kota lain di luar Pemerintah Kabupaten Sumedang.									Laporan LAKIP	6600 Menit	Laporan LAKIP	
11. Kasubag Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Aparatur menyusun konsep atau rancangan penyusunan LAKIP Kabupaten Sumedang, termasuk didalamnya menghitung nilai laporan kinerja dengan rumus-rumus perhitungan yang tepat dan naratif.									Komputer, Data LAKIP dari semua SKPD	6600 Menit	Bahan Laporan LAKIP	



 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  SEKRETARIAT DAERAH	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan oleh	:	a.n. Bupati Sumedang Plt. Sekretaris Daerah ub. Asisten Pemerintahan    Drs. H. Endah Kusyaman Pembina Utama Muda NIP. 19630401 198101 1 001
<b>Bagian Organisasi</b> <b>Sub Bagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur</b>		Nama SOP	Penyusunan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.Pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018. 12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2015 Tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018. 13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		1. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  2. Memahami Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah  3. Memahami Pedoman Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  4. Memahami Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja  5. Memahami Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah  6. Memahami Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  7. Memahami Pengoperasian Komputer dan Pengoperasian Perangkat Lunak Aplikasi	
<b>Keterkaitan SOP</b> SOP Perencanaan dan Penganggaran APBD  SOP Penyusunan Outline LKIP  SOP Review dan Evaluasi SAKIP		<b>Peralatan/ Perlengkapan</b> 1. Komputer/ Teknologi Informatika  2. Lemari Arsip  3. ATK  4. Akomodasi dan Pembiayaan	
<b>Peringatan</b> Jika SOP penyusunan SAKIP tidak dilaksanakan secara utuh maka akan berdampak kepada Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah dan Perangkat Daerah serta Pencapaian Nilai SAKIP/ LKIP. Lebih luasnya lagi dampak kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Daerah.		<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>	

## Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

### A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	: Penyusunan Manajemen Kinerja SAKIP
2	Jenis Kegiatan	: Rutin
3	Penanggung Jawab	
a.	Produk	: Sekretaris Daerah
b.	Kegiatan	: Sub Bagian Akuntabilitas dan Pendayagunaan Aparatur
4	Scope (Ruang Lingkup)	: Pemerintah Kabupaten Sumedang

### B. Identifikasi Kegiatan

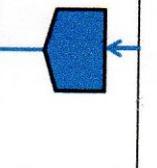
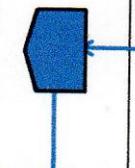
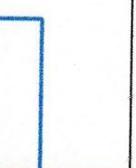
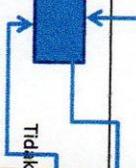
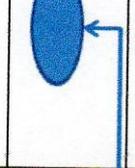
1	Judul Kegiatan	: Penyusunan SAKIP
2	Langkah Awal	: Persiapan Penyusunan SAKIP
3	Langkah Utama	: Analisis Kinerja Ruang Lingkup SAKIP
4	Langkah Akhir	: Pelaporan Umpan Balik Perbaikan SAKIP

### C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Bagian Organisasi menyusun tim pelaksana teknis kegiatan beserta jadwal kegiatan penyusunan SAKIP Kabupaten Sumedang
	2	Bagian Organisasi membuat surat undangan untuk rapat pendahuluan Tim penyusunan SAKIP Kabupaten Sumedang
	3	Seluruh Tim melaksanakan rapat persiapan Penyusunan SAKIP Kabupaten Sumedang
	4	Tim menindaklanjuti hasil rapat Tim dan mengumpulkan data SAKIP (RPJMD, RKPD, IKU Kab, IKU PD, Renja PD, Perjanjian Kinerja PD dan LKIP
	5	Tim melaksanakan Koordinasi dan Pembahasan terkait dengan Kondisi Eksisting Pencapaian Kinerja SAKIP
Langkah Utama	6	Tim melakukan Analisis dan Pengkajian atas Kondisi eksisting Kinerja SAKIP ruang Lingkupnya meliputi : (Perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja)
	7	Tim melakukan Analisis Kinerja Perencanaan dan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja
	8	Tim melakukan Analisis Kinerja Program terhadap Pencapaian Kinerja
	9	Tim melakukan Analisis Kinerja : (Perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja)
	10	Tim menganalisa rumusan unsur-unsur kunci dalam Perencanaan, seperti Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian Target. Menentukan Prioritas Kinerja Utama Kabupaten dan Perangkat daerah, dengan kriteria (Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur, memiliki jangka waktu tertentu, dapat dipantau dan dikumpulkan).
	11	Tim melakukan Cascading (Pemetaan Pohon Kinerja) memastikan bahwa Indikator kinerja tingkat Kabupaten dan PD relevan, harmonis dan Berorientasi Pada Hasil dan Tepat Sasaran.
	12	Tim melakukan Analisis Kinerja melalui Pengevaluasian terhadap (1).Rincian Kegiatan signifikasinya terhadap Maksud dan Judul Kegiatan. (2). Signifikasi Kegiatan terhadap Program dan Sasaran Strategis. Dengan Azas Berorientasi Hasil, Akuntabel, efektif dan Efisien.
	13	Tim Merekomendasikan (Program dan Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi positif terhadap pencapaian Kinerja Sasaran dan Berorientasi Hasil). Dengan Azas Efektif dan Efisien. Ditindaklanjuti Oleh Perangkat Daerah melalui Pembuatan Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.
	14	Perangkat Daerah Menindaklanjuti Rekomendasi Tim. Selanjutnya Membuat Dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala OPD. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala OPD di Lingkungan OPDnya secara berjenjang Antara Pimpinan yang atas sampai dengan Pimpinan paling bawah.
Langkah Akhir	15	Tim melakukan Monitoring dan Mengevaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Yang diperjanjikan terhadap Pencapaian Kinerja. Melalui Evaluasi dan Review LKIP Kab. dan LKIP Perangkat Daerah secara periodik.
	16	Tim sesuai dengan hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Manajemen Kinerja SAKIP membuat Laporan Akhir dan rekomendasi Tindak Lanjut serta Umpan Balik terhadap Perbaikan Pencapaian Kinerja.



KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
	Bagian Organisasi	Tim Manajemen SAKIP	Perangkat Daerah	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
Bagian Organisasi menyusun tim pelaksana teknis kegiatan beserta jadwal kegiatan penyusunan SAKIP Kabupaten Sumedang					Jadwal Kegiatan, Biodata yang akan diadakan tim	330 Menit	SK tim penyusunan SAKIP	
Bagian Organisasi membuat surat undangan untuk rapat pendahuluan Tim penyusunan SAKIP Kabupaten Sumedang					SK tim penyusunan LAKIP	330 Menit	surat undangan rapat pendahuluan	
Seluruh Tim melaksanakan rapat persiapan Penyusunan SAKIP Kabupaten Sumedang					surat undangan rapat pendahuluan	330 Menit	Hasil rapat SAKIP	
Tim mendokumentasi hasil rapat Tim dan mengumpulkan data SAKIP (RP/MD, RKP/MD, IKU Kab, IKU PD, Renja PD, Perjanjian Kinerja PD dan LKIP					Hasil rapat SAKIP	1650 Menit	Dokumen-dokumenSAKIP	
Tim melaksanakan Koordinasi dan Pembahasan terkait dengan Kondisi Eksisting Pencapaian Kinerja SAKIP					Dokumen-dokumenSAKIP	1650 Menit	Catatan Kondisi Eksisting	
Tim melakukan Analisis dan Pengkajian atas Kondisi eksisting Kinerja SAKIP ruang Lingkupnya meliputi : (Perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja)					Catatan Kondisi Eksisting	1650 Menit	Catatan Analisa Kondisi eksis SAKIP Secara Umum	
Tim melakukan Analisis Kinerja Perencanaan dan Anggaran terhadap Pencapaian Kinerja					Catatan Analisa Kondisi eksisting SAKIP Secara Umum	1650 Menit	Catatan Analisa Kinerja Perencanaan dan Anggaran Terhadap Pencapaian Kinerja	
Tim melakukan Analisis Kinerja Program terhadap Pencapaian Kinerja					Catatan Analisa Kinerja Perencanaan dan Anggaran Terhadap Pencapaian Kinerja	1650 Menit	Catatan Analisa Kinerja Progr Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja	
Tim melakukan Analisis Kinerja : (Perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja)					Catatan Analisa Kinerja Program Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja	1650 Menit	Catatan Analises Atas Muatlar LKIP	
Tim menganalisis rumusan unsur-unsur kunci dalam Perencanaan, seperti Tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian Target. Menentukan Prioritas Kinerja Utama Kabupaten dan Perangkat daerah, dengan kriteria (Spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai dengan kinerja atau hasil yang diukur, memiliki jangka waktu, lokasi, dasar/dibaca/diukur, dan dikomunikasikan).					Catatan Analisa Atas Muatlar isi LKIP	6600 Menit	Catatan Analisa Unsur unsur Kunci Perencanaan (indikator kinerja) pada PD	
Tim melakukan Cascading (Pemetaan Pohon Kinerja) memastikan bahwa Indikator kinerja tingkat Kabupaten dan PD relevan, harmonis dan Berorientasi Pada Hasil dan Tepat Sasaran.					Catatan Analisa Unsur unsur Kunci Perencanaan (indikator kinerja) pada PD	4950 Menit	Catatan analisa cascading (poi Kinerja) Pemda dan PD	

12	<p>Tim melakukan Analisis Kinerja melalui Pengevaluasian terhadap</p> <p>(1). Rincian Kegiatan signifikasinya terhadap Maksud dan Tujuan Kegiatan.</p> <p>(2). Signifikasi Kegiatan terhadap Program dan Sasaran Strategis. Dengan Azas Berorientasi Hasil, Akuntabel, efektif dan Efisien.</p>					Catatan analisa cascading (pohon Kinerja) Penda dan PD	4950 Menit	Cata Indle Penc
13	<p>Tim Merekomendasikan (Program dan Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi positif terhadap pencapaian Kinerja Sasaran dan Berorientasi Hasil). Dengan Azas Efektif dan Efisien. Ditindaklanjuti Oleh Perangkat Daerah melalui Pembuatan Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.</p>					Catatan Analisa Hubungan Indikator kinerja terhadap Pencapaian Sasaran dan Hasil	4950 Menit	Reko Perja anali
14	<p>Perangkat Daerah Menindaklanjuti Rekomendasi Tim. Selanjutnya Membuat Dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala OPD. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala OPD di Lingkungan OPDnya secara berjenjang Antara Pimpinan yang atas sampai dengan Pimpinan paling bawah.</p>					Rekomendasi pembuatan Perjanjian Kinerja yang telah di analisis Muatan isinya	4950 Menit	Doku Pemo
15	<p>Tim melakukan Monitoring dan Mengevaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Yang diperjanjikan terhadap Pencapaian Kinerja. Melalui Evaluasi dan Reviu LKIP Kab. dan LKIP Perangkat Daerah secara periodik.</p>					Pelaksanaan Program Kegiatan Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja	79.200 Menit	Catal atas F
16	<p>Tim sesuai dengan hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi Manajemen Kinerja SAKIP membuat Laporan Akhir dan rekomendasi Tindak Lanjut serta Urupan Balik terhadap Perbaikan Pencapaian Kinerja.</p>					Catatan hasil Evaluasi dan Reviu atas Pencapaian Kinerja	1650 Menit	Reko